

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065

Email : kecamatanbatibati@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 08 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024

DILINGKUP KECAMATAN BATI – BATI

KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT BATI-BATI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menunjukan dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Kecamatan Bati – Bati;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bcamat Bati-Bati tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Kecamatan Bati – Bati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomoe 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Keputusan Camat Bati – Bati tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Pada Kecamatan Bati – Bati.
- KEDUA** : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Kecamatan Bati – Bati.
- KETIGAA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bati – Bati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bati – Bati.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bati-Bati
pada tanggal : 08 Januari 2025



CAMAT BATI-BATI,

ADE GUMILAR, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19841125 200301 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI
Nomor : 08 TAHUN 2025
Tanggal : 08 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KECAMATAN BATI – BATI

No	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Kerertiban	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
9.	Kasi Pelayanan	Anggota

Ditetapkan di : Bati-Bati
pada tanggal : 08 Januari 2025

CAMAT BATI-BATI,



ADE GUMILAR, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19841125 200301

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat Allah S.W.T, Kecamatan Bati-Bati dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Kecamatan Bati-Bati atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memaparkan pencapaian kinerja Kecamatan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja dari perjanjian kinerja Tahun 2024 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian program/ kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis RPD Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024-2026, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kecamatan Bati-Bati untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024.

Bati-Bati, 16 Januari 2025

Camat Bati-Bati,



ADE GUMILAR, S.STP, M.I.Kom
NIP. 19841125 2003011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Bati-Bati. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah system maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan menegaskan agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja.

Dengan disusunnya LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024, Akuntabilitas Kecamatan Bati-Bati dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kewenangannya melalui berbagai kegiatan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya dapat disajikan secara detail. Perencanaan kinerja yang disusun pada Tahun 2024 mengacu pada target-target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat diselaraskan antara perencanaan jangka menengah, jangka pendek (tahunan) dan penganggaran tahunan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2024 dan telah berusaha keras untuk mencapai sasaran tersebut. LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024. kami juga menyadari bahwa penyajian masih memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat

beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran pada LKjIP yang belum sepenuhnya mencerminkan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini akan menjadi perhatian dari seluruh personil/staf jajaran Kantor Kecamatan Bati-Bati untuk melakukan upaya perbaikan di masa yang akan datang. Dengan adanya kelemahan ini memungkinkan terjadinya perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan harapan masyarakat dan hasil pembangunan yang diinginkan.

Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.4.996.838.717,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp.4.508.388.530,00 atau realisasi dan capaiannya 90,23%. Dengan disusunnya LKjIP Tahun 2024 ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diterima dari masyarakat serta menjadikan sumber umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen pemerintahan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan juga diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	6
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	11
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	22
I. Sistematika Penulisan	23
Bab II Perencanaan Kinerja	24
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten	24
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	31
1. Pencapaian Kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah (IKU)	36
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi	40
3. Analisis Keberhasilan/kegagalan, hambatan dan Langkah- langkah antisipasi yang diambil	43
B. Akuntabilitas Keuangan	95
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	95
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	97
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	99
Bab IV Penutup	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Cascading Kecamatan Bati-Bati

Tabel 1.2	Jumlah Desa di Kecamatan Bati-Bati dan Luas Wilayahnya
Tabel 1.3	Jumlah RT dan RW di Kecamatan Bati-Bati tahun 2023
Tabel 1.4	Jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Bati-Bati Tahun 2023
Tabel 1.5	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio tahun 2023
Tabel 1.6	Jumlah PNS berdasarkan pangkat / golongan
Tabel 1.7	Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan
Tabel 1.8	Jumlah PTT berdasarkan kualifikasi pendidikan
Tabel 1.9	Jumlah PTT berdasarkan tugasnya
Tabel 1.10	Kondisi Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Bati-Bati
Tabel 1.11	Alokasi Anggaran
Tabel 2.1	Tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Tanah Laut
Tabel 2.2	Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
Tabel 2.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Perprogram, Kegiatan dan Sub kegiatan
Tabel 3.1	Pengelompokkan Capaian Kinerja
Tabel 3.2	Target Dan Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.3	Rekap Nilai SAKIP Provinsi
Tabel 3.4	Rekapitulasi Nilai SAKIP Kab.Kota
Tabel 3.5	Perbandingan Perjanjian Kinerja
Tabel 3.6	Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.7	Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Tabel 3.8	Tabel Mutu Pelayanan
Tabel 3.9	Hasil Survey IKM Kecamatan Bati-Bati Tahun 2023
Tabel 3.10	Kategori predikat Nilai AKIP
Tabel 3.11	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bati-Bati
Tabel 3.12	Capaian Sakip Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021-2024
Tabel 3.13	Realisasi Sasaran Strategis Dan Target RPD 2024-2026

- Tabel 3.14 Efisiensi Capaian Kinerja Kecamatan Bati-Bati
- Tabel 3.15 Capaian Realisasi Keuangan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.16 Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sekretaris Camat Tahun 2024
- Tabel 3.17 Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bati-Bati
- Tabel 3.18 Pengolahan Hasil Survei Kesekretariatan Kec.Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.19 Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.20 Efisiensi Capaian Kinerja Sekretaris Camat Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.21 Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.22 Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Tahun 2024
- Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Kepala Seksi Pelayanan Tahun 2024
- Tabel 3.24 Efisiensi Capaian Kinerja Kepala Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2024
- Tabel 3.25 Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.26 Capaian Kinerja Anggaran Seksi Tata Pemerintahan
- Tabel 3.27 Efisiensi Capaian Kinerja Kepala Seksi Kemasyarakatan Tahun 2024
- Tabel 3.28 Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Seksi Kemasyarakatan Tahun 2024
- Tabel 3.29 Jumlah dan jenis PPKS yang difasilitasi Tahun 2024
- Tabel 3.30 Capaian Kinerja Anggaran Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.31 Efisiensi Capaian Kinerja Kepala Kemasyarakatan Tahun 2024
- Tabel 3.32 Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024
- Tabel 3.33 Bumdes yang dibina Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.34 Capaian Kinerja Anggaran Seksi PMD Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.35 Efisiensi Capaian Kinerja Kepala Kemasyarakatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

- Tabel 3.36 Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024
- Tabel 3.37 Capaian Kinerja Anggaran Seksi Trantib Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.38 Efisiensi Capaian Kinerja Kepala Subseksi Umum dan Kepegawaian Tahun 2024
- Tabel 3.39 Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Subbagian Umpeg Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.40 Capaian Kinerja Anggaran Subbagian Umpeg Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.41 Efisiensi Capaian Kinerja Kepala Subbagian Umpeg Tahun 2024
- Tabel 3.42 Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024
- Tabel 3.43 Capaian Kinerja Anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.44 Efisiensi Capaian Kinerja Kasubbag Renkeu Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
- Tabel 3.45 Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dan 2024
- Tabel 3.46 Sasaran Strategis dan Dukungan Anggarannya Tahun 2024
- Tabel 3.47 Perbandingan Program Dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- Tabel 3.48 Perbandingan Belanja Langsung Tahun 2023 dan Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bangunan Kantor Kecamatan Bati-Bati
Gambar 3.1	Pemberian Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
Gambar 3.2	Pemberian Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
Gambar 3.3	Pemberian Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024
Gambar 3.4	Fasilitas ramah anak Kecamatan Bati-Bati
Gambar 3.5	Latihan paskibra dalam rangka HUT RI Ke-79
Gambar 3.6	Latihan paskibra dalam rangka HUT RI Ke-79
Gambar 3.7	Pengukuhan paskibra dalam rangka HUT RI Ke-79
Gambar 3.8	Pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-79
Gambar 3.9	Pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-79
Gambar 3.10	Pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-79
Gambar 3.11	Aksi Marchingband dalam rangka HUT RI Ke-79
Gambar 3.12	Pertemuan update data kependudukan
Gambar 3.13	Safari Ramadhan
Gambar 3.14	MTQ Tk Kabupaten Tanah Laut
Gambar 3.15	Pelatihan TC
Gambar 3.16	Pelaksanaan dana hibah berupa tabliq akbar
Gambar 3.17	Pelaksanaan dana hibah berupa tabliq akbar
Gambar 3.18	Pelaksanaan dana hibah berupa turnamen bola volley
Gambar 3.19	Pelaksanaan dana hibah berupa haul Abdul Wahab
Gambar 3.20	Pra evaluasi
Gambar 3.21	Pra evaluasi
Gambar 3.22	Pertemuan rutin PKK
Gambar 3.23	Musrembang regional
Gambar 3.24	Musdes Desa Bati-bati
Gambar 3.25	Musdes Desa Laing Anggang
Gambar 3.26	Musrembangdes desa bentok kampung
Gambar 3.27	Monitoring desa kait-kait
Gambar 3.28	Sosialisasi Pajak

- Gambar 3.29 rapat koordinasi
- Gambar 3.30 Monitoring kegiatan pemungutan suara
- Gambar 3.31 Mediasi sengketa lahan
- Gambar 3.32 Rapt koordinasi forkopimcam
- Gambar 3.33 Yustisi gabungan P4GN
- Gambar 3.34 Monitoring Bersama forkopimcam
- Gambar 3.35 Pelatihan satlinmas desa LiangAnggang
- Gambar 3.36 Monitoring distribusi LPG
- Gambar 3.37 Belanja Modal APBD Murni
- Gambar 3.38 Belanja Modal APBD Perubahan
- Gambar 3.39 Apel gabungan hari jadi
- Gambar 3.40 Pameran dalam rangka hari jadi
- Gambar 3.41 Kaji tiru ke Kecamatan Pulau Laut Sigam
- Gambar 3.42 Apel harian
- Gambar 3.43 Rapat penyusunan renja 2025
- Gambar 3.44 Rapat evaluasi kinerja triwulan IV
- Gambar 3.45 Penginputan pada aplikasi esakip
- Gambar 3.46 Sosialisasi pedoman penyusunan LKj 2024

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama
2. Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja
4. Capaian Kinerja Triwulan I s/d IV
5. Monev Renstra
6. Matriks Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif perlu adanya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Bati-Bati Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Bati-Bati pada Tahun 2024.

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan Bati-Bati di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Bati-Bati dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. Dasar Hukum

LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan;
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang uraian tugas kecamatan;
 12. Peraturan Bupati Tanah laut No 50 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 Nomor 114),

D. Cascading Kinerja

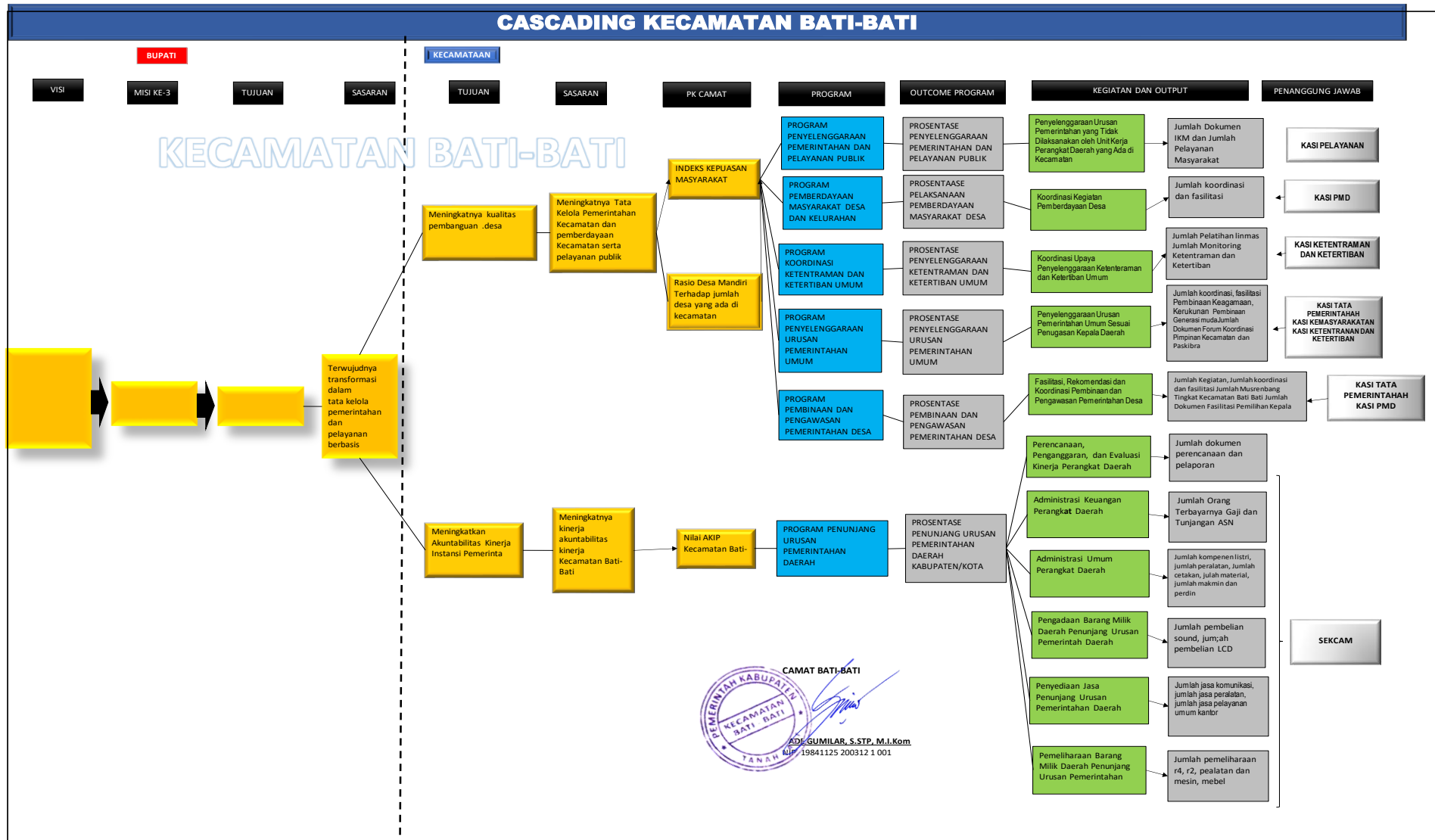
Kinerja perangkat daerah dalam berkontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan dalam hal ini Kecamatan Bati-Bati, tata kerjanya adalah sebagai berikut :

- Camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati,
- Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- Setiap pimpinan dilingkungan kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.

- Setiap pimpinan dilingkungan kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan, laporan disampaikan tepat waktu.

Cascading Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 antara Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Cascading Kecamatan Bati-Bati



E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.

(1) Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Peta proses bisnis Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024, alur proses bisnis Tahun 2024, dan alur proses pencapaian kinerja Kecamatan Bati-bati tahun 2024 dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini :



PETA PROSES BISNIS KECAMATAN BATI-BATI 2024

VISI

TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

MISI

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat Kantor Kecamatan Bati-Bati dan Aparatur Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembedayaan masyarakat, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

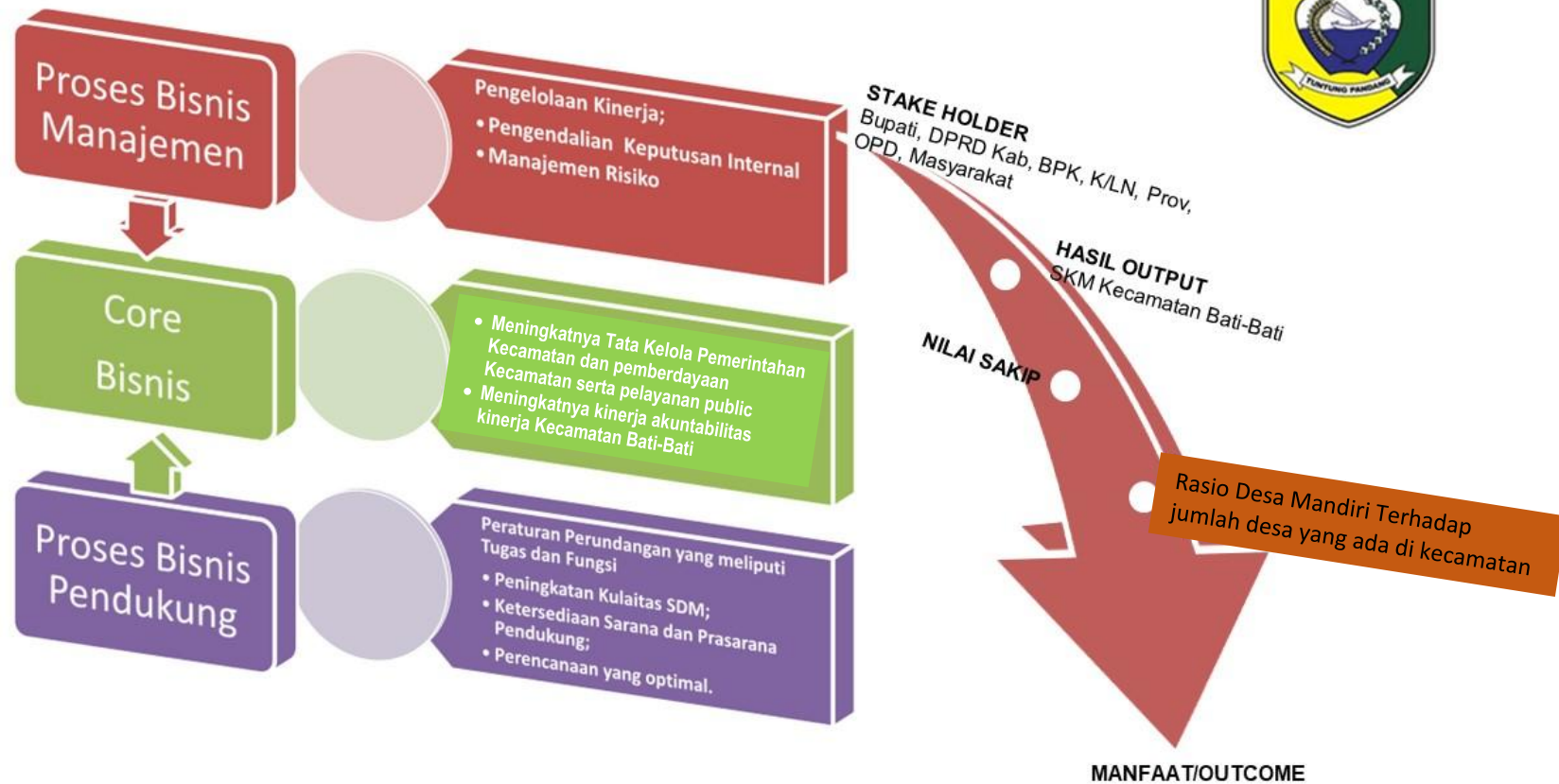
TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas pembangunan desa
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

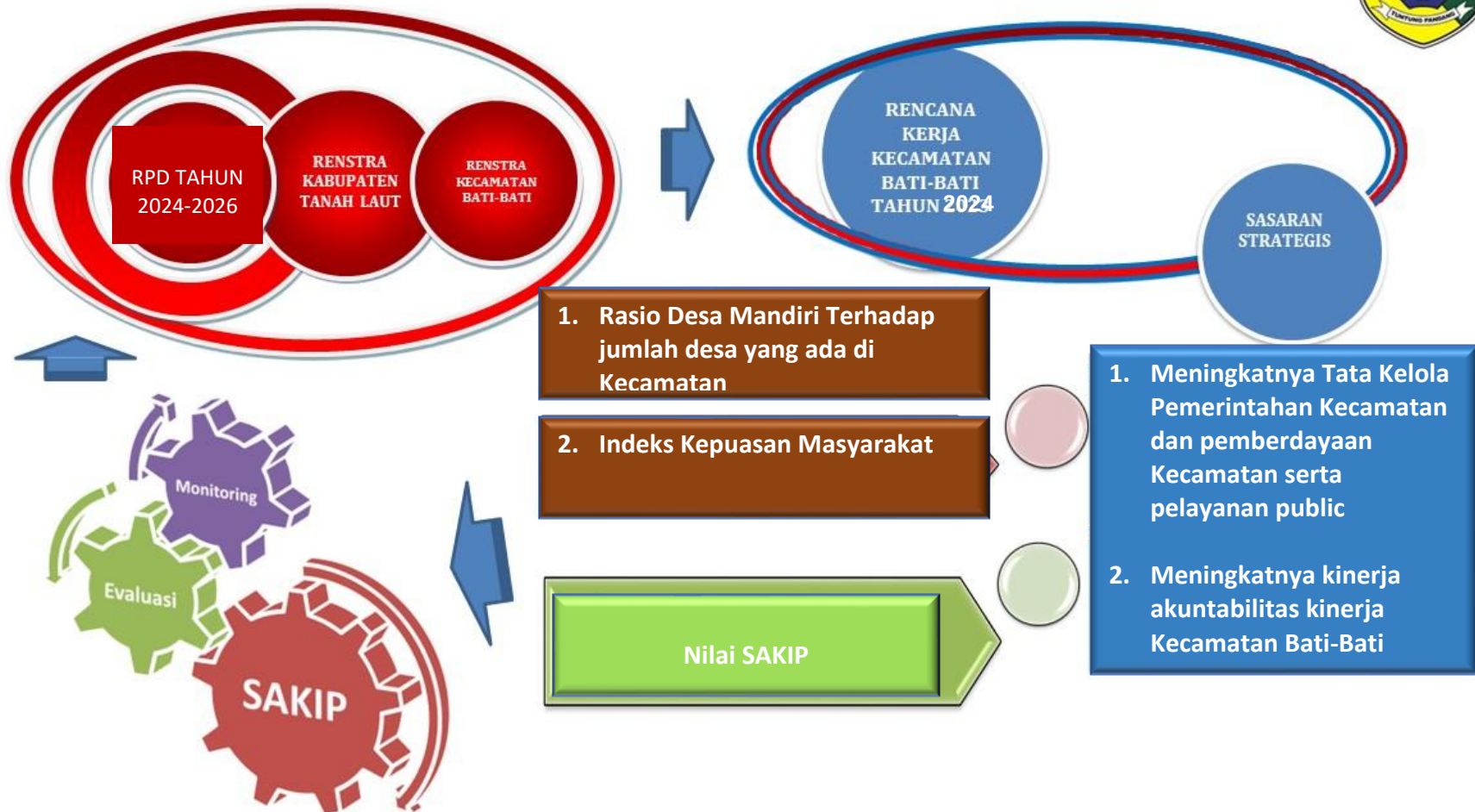
SASARAN

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik
2. Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati

ALUR PROSES BISNIS KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2024



ALUR PROSES PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN BATI—BATI 2024

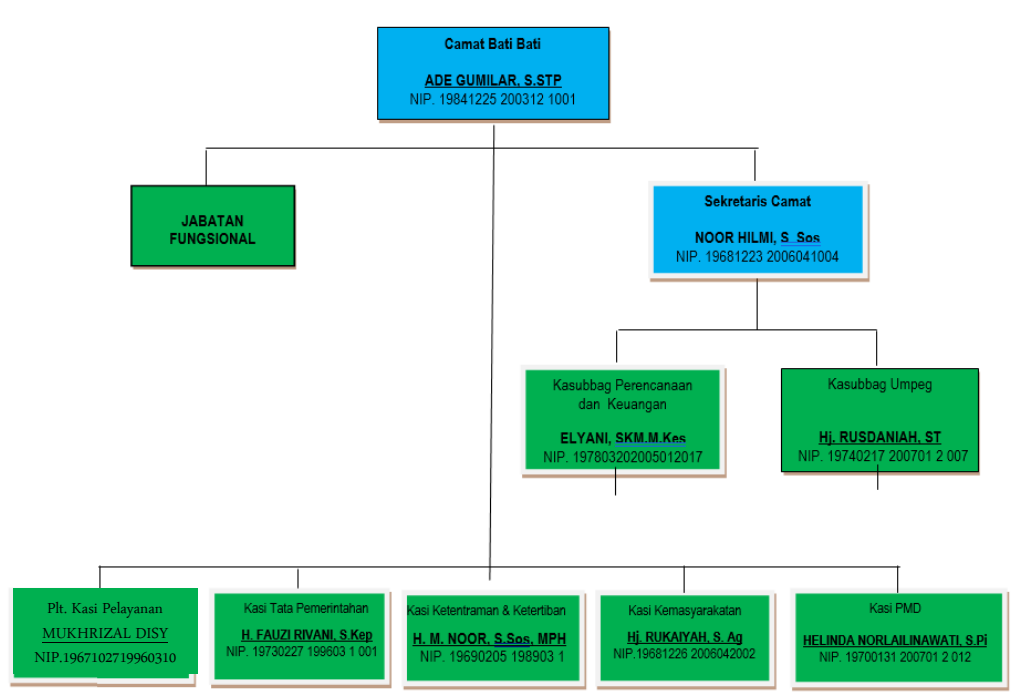


Susunan Organisasi Kecamatan Bati-Bati :terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan;
- f. Seksi Kemasyarakatan; dan
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Bati-Bati :

Bagan 1.1
STOK Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Bati Bati tahun 2019-2023 terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan dan peluang yang di hadapi oleh Kecamatan Bati-Bati adalah :

1. Tantangan

- a. Adanya perubahan kebijakan/peraturan.
- b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan.
- c. Terbatasnya jumlah/professional sumber daya manusia untuk ditempatkan dan untuk mengisi pengelola program dan kegiatan, professional jabatan fungsional serta jabatan struktural yang masih belum maksima di Kecamatan Bati Bati.

2. Peluang

- a. Adanya penerapan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
- b. Pemerintah Kabupaten yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Dukungan dari stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bati Bati dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kecamatan Bati Bati tahun anggaran 2023, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bati Bati yaitu:

- a. Mengusulkan penambahan staf yang produktif/berkualitas untuk ditempatkan di Kecamatan Bati Bati disamping itu pada tahun anggaran 2023 ini ada 2 orang yang memasuki purna tugas (pensiun).
- b. Mengadakan sosialisasi/pelatihan, koordinasi, bimbingan teknis dan pembinaan secara lebih intensif.
- c. Mengusulkan anggaran yang secara rasional dan proporsional sehingga dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana serta untuk melaksanakan semua jenis kegiatan.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

1. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Bati-bati merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah kabupaten tanah laut, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965. SKPD Kecamatan Bati-Bati beralamat di Jalan A. Yani No. 5 Desa Padang. Terletak pada koordinat

114,691° - 114,92° Bujur Timur

3,51086° - 3,6318° Lintang Selatan

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kota Banjarbaru

Sebelah Timur : Kabupaten Banjar dan Kecamatan Bajuin

Sebelah Barat : Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur

Sebelah Selatan : Kecamatan Tambang Ulang

Tinggi dari permukaan laut sebagian besar : 25 meter

Luas Wilayah : 234,75 Km²

Jumlah Desa : 14 Desa

Tabel 1.2
Jumlah Desa di Kecamatan Bati-Bati dan Luas Wilayahnya

No.	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Benua Raya	13,00	5,54
2.	Bati – Bati	9,00	3,83
3.	Padang	7,00	2,98
4.	U j u n g	6,00	2,56
5.	Ujung Baru	10,00	4,26
6.	Nusa Indah	23,00	9,80
7.	Kait – Kait	15,76	6,71
8.	Kait – Kait Baru	9,24	3,94
9.	Bentok Darat	40,00	17,04
10.	Banyu Irang	14,00	5,96
11.	Bentok Kampung	27,75	11,82
12.	Sambangan	8,00	3,41
13.	Liang Anggang	31,50	13,42
14.	Pandahan	20,50	8,73
Jumlah		234,75	100,00

Data Kependudukan Seksi Tapem 2024

Jarak tempuh Kecamatan Bati-Bati ke pusat pemerintahan adalah :

- a) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Bati-Bati dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah laut adalah 25 Km dengan waktu tempuh 30 menit.

- b) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Bati-Bati dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 23 Km dengan waktu tempuh 30 menit

Tabel 1.3
Jumlah RT dan RW di Kecamatan Bati-Bati tahun 2024

No.	Desa	Rukun Tetangga (RT)	RW/Dusun
1.	Benua Raya	15	4
2.	Bati – Bati	12	4
3.	Padang	14	3
4.	U j u n g	8	2
5.	Ujung Baru	7	3
6.	Nusa Indah	10	3
7.	Kait – Kait	13	4
8.	Kait – Kait Baru	14	6
9.	Bentok Darat	16	5
10.	Banyu Irang	16	3
11.	Bentok Kampung	8	2
12.	Sambangan	4	2
13.	Liang Anggang	12	4
14.	Pandahan	10	2
Jumlah		155	49

Data Kependudukan Seksi Tapem 2024

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan salah satu komponen yang sangat penting adalah masyarakat / penduduk, dimana keberhasilan dari suatu pemerintahan bisa dilihat dari peran serta masyarakatnya dalam mendukung program-program serta peraturan-peraturan yang telah disusun oleh aparat pemerintah tersebut. Masyarakat Kecamatan Bati-Bati merupakan penduduk yang heterogen dengan berbagai macam suku, namun kebhinekaan ini memberikan dinamika tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Bati-Bati.

Tabel 1.4
Jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO.	NAMA DESA	Luas Desa (KM2)	JUMLAH	Kepadatan Peduduk Per KM ²
1	DESA BENUA RAYA	13,00	3.428	264
2	DESA BATI - BATI	9,00	5.033	559
3	DESA PADANG	7,00	3.117	445
4	DESA UJUNG	6,00	2.865	478
5	DESA UJUNG BARU	10,00	2.609	261
6	DESA NUSA INDAH	23,00	4.215	183
7	DESA KAIT - KAIT	15,76	2.134	135
8	DESA KAIT - KAIT BARU	9,24	2.444	265
9	DESA BENTOK DARAT	40,00	3.521	88
10	DESA BANYU IRANG	14,00	2.839	203
11	DESA BENTOK KAMPUNG	27,75	2.455	88
12	DESA SAMBANGAN	8,00	1.271	159
13	DESA LIANG ANGGANG	31,50	3.663	116
14	DESA PANDAHAN	20,50	2.532	124

Data Kependudukan Seksi Tapem 2024

Tabel 1.5
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Tahun 2024

NO.	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	DESA BENUA RAYA	2397	2312	4.709
2	DESA BATI - BATI	2564	2725	5.047
3	DESA PADANG	1573	1556	3.129
4	DESA UJUNG	1465	1396	2.861
5	DESA UJUNG BARU	1353	1298	2.651
6	DESA NUSA INDAH	2166	2063	4.229
7	DESA KAIT - KAIT	1127	1009	2.136
8	DESA KAIT - KAIT BARU	1146	1092	2.238
9	DESA BENTOK DARAT	1743	1764	3.507
10	DESA BANYU IRANG	1523	1540	3.063
11	DESA BENTOK KAMPUNG	1254	1221	2.475
12	DESA SAMBANGAN	685	628	1.313
13	DESA LIANG ANGGANG	2000	1820	3.820
14	DESA PANDAHAN	1276	1267	2.543
		22272	21691	43.721

Data Kependudukan Seksi Tapem 2024

2. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di wilayah kerja Kantor Kecamatan Bati-Bati terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) orang ASN dan 6 (enam) orang honorer. Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas diketahui bahwa Kecamatan Bati-Bati masih kekurangan Sumber Daya Manusia terutama untuk mengisi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan dan beberapa staf. Berikut rincian sumber daya manusia Kantor Kecamatan Bati-Bati adalah :

Tabel 1.6
Jumlah PNS berdasarkan pangkat / golongan
Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO .	PANGKAT	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	Pembina Tingkat I	Golongan IV / b	1	
2.	Pembina	Golongan IV / a	5	
3.	Penata TK. I	Golongan III / d	3	
4.	Penata	Golongan III / c	1	
5.	Penata Muda Tk. I	Golongan III / b	1	
6.	Penata Muda	Golongan III / a	2	
7.	Pengatur Tk. I	Golongan II / d	3	
8.	Pengatur	Golongan II / c	2	
9.	Juru TK. I	Golongan I / d	0	
10	Juru	Golongan I / c	0	

Data SDM Sub Bagian Umpeg 2024

Tabel 1.7
Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan
Kantor Kecamatan Bati-Bati tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KET
1.	Magister/Strata 2/ S2	4	
2.	Sarjana / Strata 1 / S1	7	
3.	D IV	0	
4.	D III	5	
5.	SLTA / Sederajat	3	
6.	SLTP / Sederajat	0	
7.	SD / Sederajat	0	
JUMLAH		19	

Data SDM Sub Bagian Umpeg 2024

Tabel 1.8
Jumlah PTT berdasarkan kualifikasi pendidikan
Kantor Kecamatan Bati-Bati tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KET
1.	Magister/Strata 2/ S2	0	
2.	Sarjana / Strata 1 / S1	0	
3.	D IV	0	
4.	D III	0	
5.	SLTA / Sederajat	6	
6.	SLTP / Sederajat	0	
7.	SD / Sederajat	0	
JUMLAH		6	

Data SDM Sub Bagian Umpeg 2024

Tabel 1.9
Jumlah PTT berdasarkan tugasnya
Kantor Kecamatan Bati-Bati tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KET
1.	Jaga malam	1	
2.	Petugas kebersihan	3	
3.	Adminstrasi	1	
4.	Operator komputer	1	
JUMLAH		6	

Data SDM Sub Bagian Umpeg 2024

3. Sarana dan Prasarana

Kantor Kecamatan Bati Bati sejak tahun 2017 menempati bangunan gedung kantor baru dengan desain konstruksi bangunan gedung kantor modern dan permanen dengan dua lantai. Lantai dasar digunakan untuk kegiatan pelayanan umum terhadap masyarakat dan pelaksanaan kegiatan program dan administrasi perkantoran sedangkan lantai dua digunakan untuk aula pertemuan, mushalla dan secretariat PKK. Gedung kantor Kecamatan Bati Bati ini mulai dibangun Pemerintah Kabupaten tahun 2015 dan 2016 dan dimanfaatkan pada tahun 2017. Gedung kantor Kecamatan Bati Bati dibangun diatas tanah milik Pemerintan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan sumber dana pembangunan berasal dari APBD Tanah Laut secara bertahap yaitu tahun Anggaran 2015 dan 2016. Anggaran pembangunan gedung kantor Kecamatan Bati Bati sebesar Rp. 4.446.158.300,- dengan luas bangunan 1.104 M2.

Gambar 1.10
Bangunan Kantor Kecamatan Bati-Bati



Kondisi Sarana dan prasarana yang ada pada kantor Kecamatan Bati-Bati, untuk memenuhi standar minimal pelayanan publik dan fungsi penunjang administrasi pemerintahan sudah mencukupi meskipun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan maupun administrasi perkantoran, sudah tercukupi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara optimal.

Namun kedepannya tetap diperlukan penambahan sarana dan prasarana penunjang guna memenuhi target peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan administrasi perkantoran sebagai fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Rencana penambahan/pengadaan tersebut antara lain: Generator Set, Kursi Rapat, dan peralatan atau perlengkapan kantor lainnya yang dibutuhkan pada Kantor Kecamatan Bati-Bati. Adapun kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam melaksanakan masing-masing program dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.10
Kondisi Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Bati-Bati

NO .	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Meja Pimpinan Rapat	3 unit	Baik
2.	Kursi Pimpinan Rapat	4 Unit	Baik
3.	Kursi Kerja staf	15 unit	Baik
4.	Kursi Kerja pimpinan	9 Unit	Baik
5.	Kursi rapat biasa	100 unit	50% RB
6.	Komputer PC	12 unit	1 Rusak Berat
7.	Lap top	8 unit	2 Kurang Baik
8.	Mesin ketik manual	1 unit	1 Kurang Baik
9.	Mobil Dinas	2 unit	Baik
10.	Kendaraan Dinas R2	7 unit	3 Kurang Baik
11.	Scanner	3 unit	1 Kurang Baik
12.	Brankas	1 unit	Baik
13.	Camera	1 unit	Kurang Baik
14.	Proyektor	2 unit	1 kurang baik
15.	Sound system	2 set	1 Kurang Baik
16.	AC Split	15 unit	1 rusak 2 Kurang Baik
17.	Meja Kerja Staf	15 unit	Baik
18.	Meja Kerja pimpinan	9 unit	Baik
19.	Meja rapat (membentuk meja bundar)	6 unit	Baik
20.	Kursi rapat busa	12 unit	Baik
21.	Bangku tunggu	4 unit	4 Kurang Baik
22.	Mimbar / podium	1 unit	Baik
23.	Printer	16 unit	2 Kurang Baik, 3 rusak berat
24.	Rak Buku (kayu)	2 unit	Baik
25.	Pesawat telephone dan jaringannya	1 unit	Rusak berat
26.	Rak TV	1 unit	Baik
27.	Tabung Gas 12 Kg	1 unit	Baik
28.	Kompor Gas	1 unit	Baik
29.	Lemari es	2 unit	Baik
30.	Lemari kayu	2 unit	Baik
31.	Filling cabinet	10 unit	Baik
32.	Mesin Pompa air	1 unit	Baik
33.	Lemari Pakaian	1 unit	Baik
34.	Tempat tidur	2 unit	Baik
35.	Kipas Angin	6 unit	1 Rusak Berat
36.	Rak piring	1 unit	Baik
37.	Mesin potong rumput	1 unit	Kurang Baik
38.	TV	2 unit	Baik
39.	UPS	11 unit	8 Kurang Baik
40.	Dispencer	1 unit	Baik
41.	Kursi rapat (lipat)	100 unit	rusak ringan

42.	Tabung Pemadam kebakaran	1 unit	Baik
43.	Tempat sampah besi/aluminium	3 unit	Kurang baik
44.	Mesin fax	1 unit	Kurang Baik
45.	Tangga lipat	2 unit	Baik
46.	White Board	2 unit	Baik
47.	Lemari Besi / Kaca Pintu Geser	4 unit	Baik
48.	Display LED	1 unit	Baik
49.	Kursi Roda	1 Unit	Baik
50.	Rak Koran	2 Unit	Baik
51.	Karpet	20 buah	Baik
52.	Gorden	8 buah	Baik
53.	Drone	1 buah	Baik
54.	CCTV	8 buah	Baik
55.	DVR	1unit	Baik

Data Pengurus Barang Tahun 2024

4. Dukungan Anggaran

Tabel 1.11
Alokasi Anggaran

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	4.031.627.904
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.511.241
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.994
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.105.247
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.204.519.778
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.519.778
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.540.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.540.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.178.851
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.166.772
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.979.412
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.152.322
8	Penyediaan bahan/material	30.680.345
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	257.200.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.556.504
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.556.504
	Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah	254.731.530
11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.245.000
12	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.220.042
13	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.266.488
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.590.000
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	37.000.000
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	51.000.000
16	Pemeliharaan Mebel	6.440.000
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.150.000

NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.986.066
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		4.986.066
18		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.986.066
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		42.635.563
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		42.635.563
19		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.890.000
20		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.745.563
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN MASYARAKAT		23.008.832
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		23.008.832
21		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.008.832
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		876.373.610
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		876.373.610
22		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.960.156
23		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	730.764.784
24		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.648.670
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		18.006.742
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18.006.742
25		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.450.000
26		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.556.742
			4.996.638.717

DPA Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

Realisasi anggaran Kecamatan Bati-Bati Tahun Anggaran 2024 yaitu 90,23% atau Rp. 4.508.388.530,-. Masih ada 9,77% yang belum tercapai atau Rp. 488.250.187,-

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

MATRIK RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023 (PENILAIAN 2024)
KECAMATAN BATI-BATI

NO	Rekomendasi		Rencana Aksi/Tindak Lanjut	target	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status /progres penyelesaian	Ket
1	Perencanaan Kinerja	Agar pohon kinerja yang telah disusun sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan dalam penyusunan perencanaan kinerja agar berpedoman pada laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	telah disusun pohon kinerja Kecamatan Bati-Bati 2024-2026	1 dokumen	5 hari	Kasubbag Renkeu	Terlampir Pohon Kinerja Kecamatan Bati-Bati 2024-2026	
2		Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas	Telah dilakukan peningkatan kualitas perencanaan melalui rapat penyusunan indikator kinerja dan melakukan evaluasi berkala kinerja internal	2 berkas	TR I, TR II	Camat	Terlampir Evaluasi internal Dan Pengukuran Kinerja Mulai dari Camat sampai Kasubbag	
4	Pengukuran Kinerja	Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan);		4 kl	TR I, TR II, TR III dan TR IV	Camat	laporan evaluai berkala	
5		Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monitoring dan evaluasi per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya		4 kl	TR I, TR II, TR III dan TR IV	Camat	Terlampir Pengukuran Kinerja Mulai dari Kepala Perangkat Daerah Sampai Staf Dan Dokumen pemberian Reward and punishment bagi Aparatur	
6		Dalam penilaian SKP bulanan agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang berkelanjutan		1 dokumen	1 hari	Kasubbag Renkeu	PK Sekcam	
7		Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment		1 dokumen	1 hari	kasubbag Renkeu	berupa Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bati-Bati	
8	Pelaporan Kinerja	Agar melakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai		1 dokumen	1 hari	admin PPID	screen shoot PPID 13 Maret 2024	
9		Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya		1 dokumen	2 hari	Kasubbag Renkeu	tabel efisiensi kinerja	
12	Evaluasi Akuntabilatas Kenjerja Internal	Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023, dengan melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi Sakuntala dan menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2024 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pada aplikasi Sakuntala		4 kl	TR I, TR II, TR III dan TR IV	Camat	hasil monev Triwulan I, II, II dan IV	

Tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2024

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LAKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Cascading KinerjaProses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Isu Strategis Perangkat Daerah Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran, Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya, Sistematika Penulisan
- Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan secara ringkas Tujuan, Sasaran Kabupaten, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
- Bab III Akuntabilitas kinerja, menyajikan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pencapaian Kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah (IKU), Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi, Analisis Keberhasilan/kegagalan, hambatan dan Langkah-langkah antisipasi yang diambil, Akuntabilitas Keuangan, Anggaran dan Realisasi APBD 2024, Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bati-Bati.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut yang menjadi sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati beserta indikator dan target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut yang menjadi
Sasaran Strategis Kecamatan Bati-Bati

NO.	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				Realisasi 2023	Proyeksi 2024	2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan .desa	Indeks Desa	Nilai		0,74	0,74	0,75	0,76	0,76
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	0,07	0,07	0,07	0,14	0,21	0,21
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,00	90,2	90,2	90,5	91	91
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B	70,16(BB)	70,16(BB)	75,00(BB)	80,00(A)	80,00(A)
	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	67,3	75	75	77	79	79

Renstra RPD 2024-2026 Kecamatan Bati-Bati

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bati-Bati beserta indikator dan target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa		Indeks Desa	Nilai	0,74
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	0,07
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,2
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	70,16
		Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	75

Renstra RPD 2024-2026 Kecamatan Bati-Bati

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada Tahun 2024 ditetapkan target kinerja tahunan yang ditandatangani oleh Camat Bat-Bati tertanggal 19 September 2024, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	0,07	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada	Kecamatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,2	Hasil Survey	Kecamatan
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	75	Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Kecamatan

Renja 2024 Kecamatan Bati-Bati

Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon III dan

Eselon IV pada Kecamatan Bati-Bati dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK	Satuan
CAMAT				
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,07	Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	Nilai
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja kecamatan bati-bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	75,00	Nilai
SEKCAM				
1.	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	75,60	Nilai
		Nilai komponen perencanaan	23,50	Nilai
		Nilai komponen pengukuran	23,10	Nilai
		Nilai komponen pelaporan	11,25	Nilai
		Nilai komponen evaluasi internal	18,75	Nilai
		Hasil survei pelayanan kesekretariatan penunjang kinerja perangkat daerah	90	Nilai
KASI PELAYANAN				
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen
	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Dokumen
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen
KASI TAPEM				
1.	Terwujudnya desa yang tertib administrasi	Persentase desa yang tertib administrasi	100	Persen
	Terlaksananya pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian bhineka tunggal ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian bhineka tunggal ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	29	orang
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	29	orang
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	Dokumen

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK	Satuan
KASI KEMASYARAKATAN				
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100	Persen
	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	1000	orang
KASI PMD				
1.	Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Persentase BUMDes yang dibina	100	Persen
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Dokumen
	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	14	Lembaga
	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14	Laporan
KASI TRANTIB				
1.	Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	100	Persen
	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	12	Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1	Laporan
	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	6	Dokumen
KASUBBAG UMPEG				
1	Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100	Persen
2	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90	Nilai

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK	Satuan
3	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien	90	Nilai
4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90	Nilai
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	8	Laporan
6	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	26	Paket
KASUBBAG RENKEU				
1.	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	Persen
2	Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	90	Nilai

Renja 2024 Kecamatan Bati-Bati

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Perprogram, Kegiatan dan Sub kegiatan
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	4.031.627.904
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.511.241
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.994
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.105.247
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.204.519.778
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.519.778
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.540.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.540.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.178.851
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.166.772
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.979.412
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.152.322
8	Penyediaan bahan/material	30.680.345
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	257.200.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.556.504
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.556.504
	Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah	254.731.530
11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.245.000
12	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.220.042
13	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.266.488
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.590.000
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	37.000.000
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	51.000.000
16	Pemeliharaan Mebel	6.440.000
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.150.000

NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.986.066
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		4.986.066
18	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		4.986.066
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		42.635.563
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		42.635.563
19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		1.890.000
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		40.745.563
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN MASYARAKAT		23.008.832
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		23.008.832
21	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		23.008.832
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		876.373.610
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		876.373.610
22	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		99.960.156
23	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		730.764.784
24	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		45.648.670
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		18.006.742
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18.006.742
25	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9.450.000
26	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		8.556.742
			4.996.638.717

Renja 2024 Kecamatan Bati-Bati

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Kecamatan bati-Bati menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah., berdasarkan capaian rata- rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengelompokkan Capaian Kinerja

Urutan	Kinerja	
	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

Permengari RI Nomor 86 Tahun 2017

Sasaran RPD

Tabel 3.2
Target Dan Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bati-Bati

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			Realisasi 2023	Proyeksi 2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik							
	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	0,07	0.07	0.07	0,14	0,21	0,21
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,00	90,2	90,2	90,5	91	91
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati							
	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	75.7	75	75	77	79	79

Renstra RPD Kecamatan Bati-Bati 2024-2026

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berikut ini Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Rekap Nilai SAKIP Provinsi KALSEL Tahun 2023-2024

NO	PROVINSI	NILAI SAKIP 2023	NILAI SAKIP 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Provinsi Kalimantan Selatan	81,21	82,04	0,83

Biro organisasi Setda Prov.kalsel

Tabel 3.4
 Rekapitulasi Nilai SAKIP
 Kabupaten/Kota Provinsi Kalsel Tahun 2023-2024

NO	KOTA/KABUPATEN	NILAI SAKIP 2023	NILAI SAKIP 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	82,08	84,07	1,99
2	Kabupaten Balangan	70,17	72,09	1,92
3	Kabupaten Tapin	69,02	71,00	1,98
4	Kota Banjarmasin	72,73	70,70	2,03
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	68,33	70,20	1,87
6	Kabupaten Tanah Laut	67,52	70,16	2,64
7	Kabupaten Barito Kuala	68,53	68,01	0,52
8	Kabupaten Tabalong	67,48	67,10	0,38
9	Kabupaten Tanah Bumbu	66,04	67,09	1,05
10	Kabupaten Banjar	68,10	68,10	0,00
11	Kota Banjarbaru	67,02	66,83	0,19
12	Kabupaten Hulu Sungai Utara	64,40	64,82	0,42
13	Kabupaten Kotabaru		61,78	61,78

Biro organisasi Setda Prov.kalsel

Adapun sebagai perbandingan perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Kecamatan Bati-Bati yang ditetapkan sebagai komitmen dalam mencapai sasaran strategis camat sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2023 Dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis 2023	Indikator Kinerja 2023	Sasaran Strategis 2024	Indikator Kinerja 2024
1	CAMAT		CAMAT	
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks/Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja kecamatan bati-bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati
2	SEKCAM		SEKCAM	
	1. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporankinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Nilai SAKIP Persentase pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan yang tertib	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Nilai komponen perencanaan Nilai komponen pengukuran Nilai komponen pelaporan Nilai komponen evaluasi internal Hasil survei pelayanan kesekretariatan penunjang kinerja perangkat daerah
3	KASI PELAYANAN		KASI PELAYANAN	
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi Survei kepuasan masyarakat	Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu
4	KASI TAPEM		KASI TAPEM	
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dan data kependudukan dengan baik Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik penyelenggaraan pemilu, pilkada dan penilaian kades serta penjangkaran aparat Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	Terwujudnya desa yang tertib administrasi	Persentase desa yang tertib administrasi
5	KASI KEMASYARAKATAN		KASI KEMASYARAKATAN	
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang sosial Jumlah kegiatan di bidang sosial, agama, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi
6	KASI PMD		KASI PMD	
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Persentase BUMDes yang dibina

No	Sasaran Strategis 2023	Indikator Kinerja 2023	Sasaran Strategis 2024	Indikator Kinerja 2024
7 KASI TRANTIB			KASI TRANTIB	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah penanganan dan moitoring Gangguan Kamtibmas di kec yg difasilitasi	Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani
		jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif		
		Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring		
8 KASUBBAG UMPEG			KASUBBAG UMPEG	
1	Meningkatnya pengeloaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah ASN yang administrasi perkantoran terlayani dengan baik	Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik
2		Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah
3		Jumlah ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien
4			Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
5			Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6			Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
9 KASUBBAG RENKEU			KASUBBAG RENKEU	
1.	Meningkatnya pengeloaan administrasi perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu
2		Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah

Perjanjian kinerja tersebut terjadi perbedaan disebabkan karena danya perubahan pohon kinerja yang telah menyesuaikan RPD 2024-2026.

Berikut ini akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024, Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama, Perbandingan Target dan realisasi KinerjaTahun 2024, Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024, Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPD 2024-2026, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Kecamatan lain, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional, Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah (IKU)

a. Eselon IIIa (Camat)

Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Camat 2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK Camat	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,07	Nilai	0,64	900,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	Nilai	92,48	102,76
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja kecamatan bati-bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	75,00	Nilai	75,60	100,80
Rata-Rata Capaian						367,85

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Berikut ini penjelasan capaian indikator utama adalah sebagai berikut :

1. Rasio Desa Mandiri (RDM)

Rumus Perhitungan :

Rasio Desa Mandiri =
$$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah desa yang ada}}$$

Berikut adalah cara menghitung Rasio Desa Mandiri (RDM) berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia:

Komponen RDM

- 1. Indeks Kemandirian Ekonomi (IKE)
 - Jumlah Penduduk Miskin (JPM)

- Pendapatan Per Kapita (PPK)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- b. Indeks Kemandirian Pangan (IKP)
 - Jumlah Produksi Pangan (JPP)
 - Konsumsi Pangan per Kapita (KPK)
 - Ketersediaan Pangan (KP)
- c. Indeks Kemandirian Energi (IKE)
 - Jumlah Sumber Energi Terbarukan (JSET)
 - Konsumsi Energi per Kapita (KEPK)
 - Ketersediaan Energi (KE)
- d. Indeks Kualitas Hidup (IKH)
 - Tingkat Kematian Bayi (TKB)
 - Tingkat Kematian Ibu Melahirkan (TKIM)
 - Jumlah Fasilitas Kesehatan (JFK)
- e. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPD)
 - Kualitas Perencanaan (KP)
 - Kualitas Pelaksanaan (KPL)
 - Kualitas Pengawasan (KPG)

Rumus Perhitungan RDM

$$\text{RDM} = (\text{IKE} + \text{IKP} + \text{IKE} + \text{IKH} + \text{ITKPD}) / 5$$

Kategori RDM

1. Desa Sangat Tertinggal: $\text{RDM} < 0,3$
2. Desa Tertinggal: $\text{RDM } 0,3\text{-}0,5$
3. Desa Berkembang: $\text{RDM } 0,5\text{-}0,7$
4. Desa Maju: $\text{RDM } 0,7\text{-}0,9$
5. Desa Mandiri: $\text{RDM} \geq 0,9$

Rasio desa mandiri di Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 adalah 0,64 dengan rincian terdapat 9 desa yang sudah mandiri dari 14 desa yang ada.

9 desa tersebut sudah dapat mencapai $RDM \geq 0,9$ maka masuk dalam katagori desa mandiri. Data tersebut diambil dari aplikasi Kemendes PDTT Republik Indonesia Tahun 2024. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

No.	Desa	STATUS IDM	
		2023	2024
1.	Benua Raya	Maju	Mandiri
2.	Bati – Bati	Maju	Maju
3.	Padang	Mandiri	Mandiri
4.	U j u n g	Maju	Mandiri
5.	Ujung Baru	Maju	Mandiri
6.	Nusa Indah	Maju	Maju
7.	Kait – Kait	Maju	Mandiri
8.	Kait – Kait Baru	Mandiri	Mandiri
9.	Bentok Darat	Maju	Mandiri
10.	Banyu Irang	Maju	Maju
11.	Bentok Kampung	Maju	Mandiri
12.	Sambangan	Maju	Maju
13.	Liang Anggang	Maju	Mandiri
14.	Pandahan	Maju	Maju

Kemendes PDTT Republik Indonesia Tahun 2024

Dengan demikian target rasio desa mandiri Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 telah tercapai dan melebihi target yaitu 0,64 dari target 0,07 atau 900%.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah. IKM biasanya dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti :

- Kualitas Pelayanan: meliputi prosedur, kejelasan, dan kepastian petugas dalam memberikan pelayanan.
- Ketersediaan Fasilitas: meliputi ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

yang mendukung pelayanan.

- Kepuasan Masyarakat: meliputi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, adalah :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan
- e. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan
- f. Kompetensi/Kemampuan Pelaksana Pelayanan
- g. Perilaku Pelaksana Pelayanan
- h. Sarana dan Prasarana Pelayanan
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan sebuah instansi pemerintah berdasarkan Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dapat kita lihat pada urai tabel berikut:

Tabel 3.8
Tabel Mutu pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644– 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

PerMenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Bati-Bati diambil dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024, survei dilakukan pada triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4 masing-masing dilalukan terhadap 150 responden yang mendapatkan pelayanan di kantor Kecamatan Bati-Bati dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9
Hasil Survey IKM Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

No.	Ruang Lingkup SKM	NRR TW 1	NRR TW II	NRR TW III	NRR TW IV
1	Persyaratan	3,613	3,667	3,633	3,66
2	Kemudahan Prosedur	3,547	3,513	3,487	3,587
3	KecepatanWaktu Pelayanan	3,44	3,373	3,373	3,413
4	Biaya / Tarif	4	4	4	4
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,6	3,72	3,613	3,567
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,607	3,96	3,627	3,667
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3,7	3,753	3,627	3,627
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,693	3,693	3,587	3,52
9	Penanganan Pengaduan	3,94	3,92	3,847	3,82
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		94,15	93,25	91	91,19
Nilai Hasil IKM		94,15	93,25	91	91,19

Seksi Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

Berdasarkan hasil survei pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) TR I : 94,15, TR II : 93,25, TR III : 91 dan TR IV : 91,19** maka **Nilai akhir IKM Kecamatan Bati_Bati Adalah 92,48**, sehingga kinerja pelayanan Kecamatan Bati-Bati berada pada mutu pelayanan dengan kategori **Sangat Baik**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100,00. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 92,48 atau Sangat Baik merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur biaya/tarif (4.000) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah kecepatan waktu pelayanan (3,373). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari biaya/tarif Dimana tidak dilakukan pembayaran dalam pemberian pelayanan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,100 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur

pelayanan Kecamatan Bati-Bati pada umumnya Sangat Baik dan sudah merasa puas dengan pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu ditingkatkan prosedur pelayanannya. Dengan demikian nilai IKM Kecamatan Bati-Bati 90,48 berarti telah tercapai dari target tahun 2024 adalah 90 atau 102,76%.

3. Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtiran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja ; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan Gambaran Tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut :

Tabel 3.10
Katagori predikat Nilai AKIP

Perdikat	Nilai	Interpretasi
AA	90-100	Sangat memuaskan
A	80-90	Memuaskan
BB	70-80	Sangat Baik
B	60-70	Baik
CC	50-60	Cukup (Memadai)
C	30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Permen PANRB No. 88 Tahun 2021

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati menunjukkan nilai sebesar 75,60 dengan predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**” yaitu akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bati-Bati

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	20,10	22,50
b. Pengukuran Kinerja	30	20,70	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15	9,75	11,25
d. Evaluasi Internal	25	16,75	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		67,3	75,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

LHE SAKIP Kecamatan Bati-Bati tahun 2024

Dengan demikian nilai AKIP Kecamatan Bati-bati Tahun 2024 sudah tercapai atau tepatnya melebihi target yaitu 75,60 dari target 75 atau 100,80%.

Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Kecamatan Bati-Bati telah berupaya maksimal dari tahun ke tahun dalam menerapkan SAKIP. Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 telah mendapatkan nilai AKIP 75,60 dengan predikat Baik Sekali. Terjadi Kenaikan pencapaian AKIP Kecamatan Bati-Bati jika dibandingkan nilai AKIP Tahun 2023 yaitu 67,3, Ringkasan evaluasi AKIP sampai Tahun 2024 Kecamatan Bati-Bati, provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Sakip Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	REALISASI CAPAIAN			REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024		
			2021	2022	2023	TARGET	CAPAIAN	%
1	2	3	6	7	8	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati							
	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	60,36	71,7	67,3	75	75,6	100,8

Sekretariat Kecamatan Bati-Bati

Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPD 2024-2026

Capaian nilai AKIP Kecamatan Bati-bati Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target RPD 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Realisasi Sasaran Strategis Dan Target RPD 2024-2026
Kecamatan Bati-Bati

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			Realisasi 2023	Realisasi 2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik							
	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	-	0.64	0.07	0,14	0,21	0,21
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,00	92,48	90,2	90,5	91	91
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati							
	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	75.7	75,60	75	77	79	79

Sekretariat Kecamatan Bati-Bati 2024

Realisasi sasaran strategis dengan indikatornya telah tercapai atau telah lebih dari target RPD 2024-2026.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Kecamatan lain

Capaian kinerja Kecamatan Bati-bati Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Kecamatan Bati-Bati dengan Kecamatan Lain
di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Satuan	KECAMATAN BATI-BATI			KECAMATAN BAJUIN			KECAMATAN BUMI MAKMUR		
				Target /PK Camat	Realisasi	Persentase Capaian	Target /PK Camat	Realisasi	Persentase Capaian	Target /PK Camat	Realisasi	Persentase Capaian
1.	•Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Nilai	0,07	0,64	900,00	0,14	0,55	392,86	0,45	0,36	80,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,00	92,48	102,76	89,00	87,17	97,94	90,00	92,13	102,37
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja kecamatan bati-bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	75,00	75,60	100,80	83,00	77,45	93,31	75,00	72,10	96,13
Rata-Rata Capaian						367,85	194,70			92,83		

Sekretariat Kecamatan Tahun 2024

Dibandingkan dengan Kecamatan Bajuin dan Bumi makmur maka capaian kinerja Kecamatan Bati-bati merupakan yang tertinggi dari semua indikator kinerja.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Capaian kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional maka :

Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan

Terdapat 14 desa yang ada di Kecamatan Bati-bati, 9 desa telah dapat mencapai desa mandiri dan sisanya sudah dalam katagori desa maju, jadi rasio desa mandiri adalah 9/14 desa maka diperoleh hasil 0,64 sesuai desa mandiri sudah berada dalam nilai $RDM \geq 0,9$.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai akhir IKM Kecamatan Bati_Bati Tahun 2024 Adalah 92,48, sehingga kinerja pelayanan Kecamatan Bati-Bati berada pada mutu pelayanan dengan kategori **“Sangat Baik”**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100,00.

Nilai AKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 75,60 dengan peringkat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**” yaitu akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian rasio desa mandiri sangat tinggi karena ada 9 desa yang telah mencapai $RDM \geq 0,9$, dan sisanya ada 5 desa dengan kategori RDM maju atau 0,7-0,9. Pelayanan terhadap masyarakat/publik terkait pelayanan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan. Kenaikan penilaian terutama pada unsur biaya, Dimana pada triwulan 1-4 dengan nilai 4. Hal ini juga didukung oleh dari kesiapan pelayanan publik di kantor Kecamatan Bati-Bati baik sumber daya manusia, sarana prasarana penunjang dan jaringan internet. Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati meningkat Tahun 2024 karena disebabkan adanya peningkatan implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pencapaian kinerja terutama pada kelengkapan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Kendala yang dihadapi Kecamatan Bati-Bati dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah yakni unsur kecepatan waktu pelayanan. Berdasarkan analisa kami hal ini antara lain kurangnya sumber daya manusia terutama jabatan kepala seksi pelayanan yang masih kosong dan kurangnya staf pelayanan yang berusia muda, terbatasnya sarana prasarana seperti komputer dan printer. Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini kedepannya yaitu dengan mengusulkan pengisian jabatan kepala seksi pelayanan yang kosong dan rolling staf untuk pelayanan yang lebih muda, pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan seperti computer dan printer.

Analisa peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi

- a. Upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten

- terutama pada sumber daya manusia yaitu peningkatan kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
 - c. Pemberian penghargaan/reward terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi yaitu dengan pemilihan pegawai terbaik di lingkup Kecamatan Bati-Bati.
 - d. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja dengan penambahan atau perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan sasarn strategis, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan mauun sumber daya lainnya yaitu dengan menganalisis sumber daya itu sendiri sehingga tercapai taget kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi capaian kinerja Kecamatan Bati-Bati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Efisiensi Capaian Kinerja Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2024

No	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Keuangan	Efiseinsi
1.	367,85	90,23	277,62

Persentase capaian kinerja Kecaatan Bati-bati tahun 2024 dengan rata-rata capaian 357,85% dengan pencapaian keuangan 90,23% maka didapatkan efisiensi kinerja adalah 277,62%.

Analisis prgram/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 4.996.638.717.-. dan realisasi sebesar Rp. 4.508.388.530,- atau 90,23 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Capaian Realisasi Keuangan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4,00	5=4/3*100
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH		4.031.627.904	3.575.526.690,00	88,69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.511.241	9.422.337,00	81,85
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.994	4.288.778,00	79,33
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.105.247	5.133.559,00	84,08
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.204.519.778	2.807.494.936,00	87,61
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.519.778	2.807.494.936,00	87,61
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.540.000	13.450.000,00	86,55
4		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.540.000	13.450.000,00	86,55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		320.178.851	305.853.418,00	95,53
5		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.166.772	2.835.600,00	89,54
6		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.979.412	17.152.900,00	81,76
7		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.152.322	7.582.200,00	93,01
8		Penyediaan bahan/material	30.680.345	29.935.000,00	97,57
9		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	257.200.000	248.347.718,00	96,56
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		117.556.504	99.250.000,00	84,43
10		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.556.504	99.250.000,00	84,43
	Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah		254.731.530	232.584.699,00	91,31
11		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.245.000	74.510.018,00	78,23
12		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.220.042	3.821.500,00	90,56
13		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.266.488	154.253.181,00	99,35
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		107.590.000	107.471.300,00	99,89
14		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	37.000.000	36.999.300,00	100,00
15		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	51.000.000	50.992.000,00	99,98
16		Pemeliharaan Mebel	6.440.000	6.440.000,00	100,00
17		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.150.000	13.040.000,00	99,16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.986.066	4.646.560,00	93,19
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		4.986.066	4.646.560,00	93,19
18		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.986.066	4.646.560,00	93,19

NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4,00	5=4/3*100
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH		4.031.627.904	3.575.526.690,00	88,69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.511.241	9.422.337,00	81,85
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.994	4.288.778,00	79,33
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.105.247	5.133.559,00	84,08
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.204.519.778	2.807.494.936,00	87,61
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.519.778	2.807.494.936,00	87,61
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.540.000	13.450.000,00	86,55
4		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.540.000	13.450.000,00	86,55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		320.178.851	305.853.418,00	95,53
5		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.166.772	2.835.600,00	89,54
6		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.979.412	17.152.900,00	81,76
7		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.152.322	7.582.200,00	93,01
8		Penyediaan bahan/material	30.680.345	29.935.000,00	97,57
9		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	257.200.000	248.347.718,00	96,56
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		117.556.504	99.250.000,00	84,43
10		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.556.504	99.250.000,00	84,43
	Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah		254.731.530	232.584.699,00	91,31
11		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.245.000	74.510.018,00	78,23
12		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.220.042	3.821.500,00	90,56
13		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.266.488	154.253.181,00	99,35
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		107.590.000	107.471.300,00	99,89
14		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	37.000.000	36.999.300,00	100,00
15		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	51.000.000	50.992.000,00	99,98
16		Pemeliharaan Mebel	6.440.000	6.440.000,00	100,00
17		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.150.000	13.040.000,00	99,16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.986.066	4.646.560,00	93,19
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		4.986.066	4.646.560,00	93,19
18		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.986.066	4.646.560,00	93,19
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		42.635.563	39.743.000,00	93,22
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		42.635.563	39.743.000,00	93,22
19		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.890.000	1.890.000,00	100,00
20		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.745.563	37.853.000,00	92,90

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.635.563	39.743.000,00	93,22
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.635.563	39.743.000,00	93,22
19		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.890.000	1.890.000,00	100,00
20		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.745.563	37.853.000,00	92,90
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN MASYARAKAT	23.008.832	18.720.000,00	81,36
		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	23.008.832	18.720.000,00	81,36
21		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.008.832	18.720.000,00	81,36
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	876.373.610	860.302.280,00	98,17
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	876.373.610	860.302.280,00	98,17
22		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.960.156	96.440.280,00	96,48
23		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	730.764.784	727.775.000,00	99,59
24		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.648.670	36.087.000,00	79,05
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.006.742	9.450.000,00	52,48
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.006.742	9.450.000,00	52,48
25		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.450.000	9.450.000,00	100,00
26		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.556.742	0,00	-
			4.996.638.717	4.508.388.530,00	90,23

b. Eselon IIIb (Sekretaris Camat)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Camat Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja
Sekretaris Camat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target/PK Sekcam	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Nilai komponen perencanaan	22,50	Nilai	22,50	100,00
		Nilai komponen pengukuran	23,10	Nilai	23,10	100,00
		Nilai komponen pelaporan	11,25	Nilai	11,25	100,00
		Nilai komponen evaluasi internal	18,75	Nilai	18,75	100,00
		Hasil Evaluasi	75	Nilai	75,6	100,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja						BB

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Hasil survei pelayanan kesekretariatan kinerja perangkat daerah adalah 90,88 dari target 90 atau tercapai 100, 98%.

Rata-Rata capaian Kinerja adalah $(100,80 + 100,98) / 2 = 100,89$

Rumus Perhitungan :

Perhitungan mengacu pada **Permen PANRB No. 88 Tahun 2021** yaitu Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati, menunjukkan nilai sebesar 75,60 dengan predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**” yaitu akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bati-Bati

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		2023	2024
a. Perencaanaan Kinerja	30	20,10	22,50
b. Pengukuran Kinerja	30	20,70	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15	9,75	11,25
d. Evaluasi Internal	25	16,75	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		67,3	75,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

LHE SAKIP Kecamatan Bati-Bati tahun 2024

Dengan demikian nilai AKIP Kecamatan Bati-bati Tahun 2024 sudah tercapai atau tepatnya melebihi target yaitu 75,60 dari target 75 atau 100,80%. Sedangkan hasil survei pelayanan kesekretariatan penunjang kinerja perangkat daerah adalah merupakan hasil yang diperoleh dari survey yang dilaksanakan kepada semua ASN yang ada di Kecamatan Bati-Bati sebanyak 20 orang, .survei dilakukan pada bulan Desember 2024 dengan menggunakan google form. Hasil survey sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pengolahan Hasil Survei Kesekretariatan
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	4	3	4
2	3	4	3	4	3	3	4	2	4
3	3	4	3	4	3	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
5	4	3	3	4	3	4	4	3	4
6	3	3	3	4	3	3	4	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	3	4	3	3	4	2	4
10	3	3	4	4	3	3	4	3	4
11	4	4	4	4	4	3	4	4	4
12	3	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	3	3	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	3	3	3	4	3	3	4	4	4
16	4	4	3	4	3	3	4	3	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	4	4	3	3	4	4	4
19	4	4	3	4	4	3	4	3	4
20	3	3	4	4	3	3	4	3	4
ΣNilai /Unsur	69	72	70	80	69	68	80	67	80
NRR / Unsur	3,450	3,600	3,500	4,000	3,450	3,400	4,000	3,350	4,000
NRR tertbg/	0,383	0,400	0,389	0,444	0,383	0,377	0,444	0,372	0,444
IKM Unit pelayanan									*) 3,6
									**) 90,88

Keterangan :
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- HSK = hasil Survei Kesekretariatan
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang

-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

HSK KECAMATAN :

90,88

Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,450
U2	Prosedur pelayanan	3,600
U3	Kecepatan waktu pelayanan	3,500
U4	Kewajaran Biaya/tarif	4,000
U5	Kesesuaian produk dan standar pelayanan	3,450
U6	Kemampuan /Kompetensi Petugas	3,400
U7	Perilaku Petugas pelayanan	4,000
U8	Sarana dan Prasarana	3,350
U9	Penanganan Pengaduan	4,000

Peserta

Jawabans

Detailans

Bagian 1 dari 3

Formulir Penilaian Kesekretariatan

KUESIONER SURVEI PELAYANAN KESekretARIATAN PADA KECAMATAN SIKATIGAHATI TAHUN 2024

Tanggal survei *

Bulan, hari, tahun

Bagian 1

Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 2 dari 3

PROFIL RESPONDEN

Ribih seksual dengan profil Anda

Jenis Kelamin

L

P

Pendidikan

SMA

D3

D1

D2

Jabatan

CAMAT

SEKIDAM

KAGI

KAGUBAG

Analis

Pengelola

Pengadministrasi

Fungsional

PKK

PTT

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

1. Ribih jawaban pada kotak yang tersedia

Bagaimana pendapat saudara tentang keseksualan pelayanan kesekretariatan dengan peraturan yang berlaku.

1. Tidak Seksual

2. Kurang seksual

3. Seksual

4. Sangat Seksual

Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di sekretariat ini.

1. Tidak mudah

2. Kurang Mudah

3. Mudah

4. Sangat Mudah

☐ 2. Kurang sesuai
 ☐ 3. Sesuai
 ☐ 4. Sangat Sesuai

Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di sekretariat ini.

☐ 1. Tidak mudah
 ☐ 2. Kurang Mudah
 ☐ 3. Mudah
 ☐ 4. Sangat Mudah

Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di sekretariat.

☐ 1. Tidak cepat
 ☐ 2. Kurang Cepat
 ☐ 3. Cepat
 ☐ 4. Sangat Cepat

Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan kesekretariatan.

☐ 1. Sangat Mahal
 ☐ 2. Cukup Mahal
 ☐ 3. Murah
 ☐ 4. Gratis

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan kesekretariatan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

☐ 1. Tidak Sesuai
 ☐ 2. Kurang Sesuai
 ☐ 3. Sesuai
 ☐ 4. Sangat Sesuai

Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam pelayanan kesekretariat.

☐ 1. Tidak Kompeten
 ☐ 2. Kurang Kompeten
 ☐ 3. Kompeten
 ☐ 4. Sangat Kompeten

Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan kesekretariatan terkait kecapatan dan keramahan.

☐ 1. Tidak sopan dan tidak ramah
 ☐ 2. Kurang Sopan dan kurang ramah
 ☐ 3. Sopan dan ramah
 ☐ 4. Sangat Sopan dan ramah

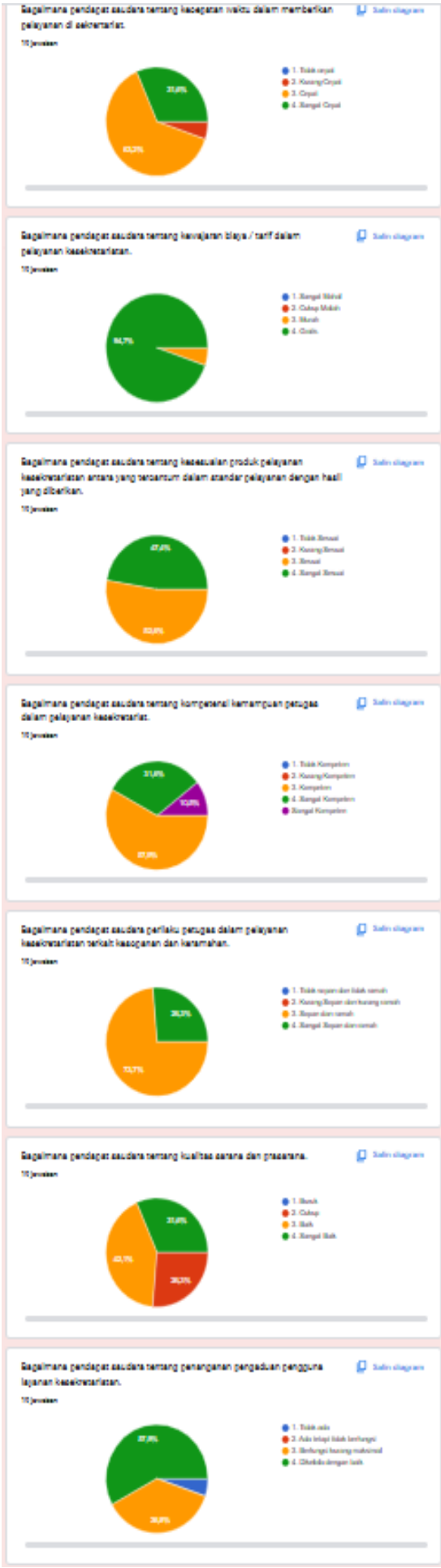
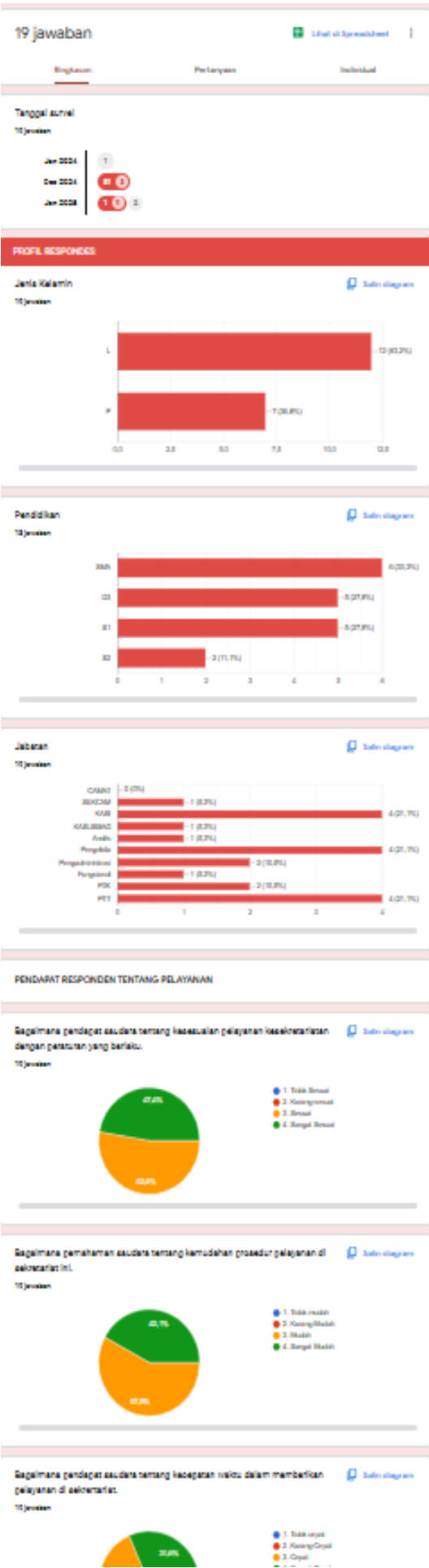
100

Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.

☐ 1. Buruk
 ☐ 2. Cukup
 ☐ 3. Baik
 ☐ 4. Sangat Baik

Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan kesekretariatan.

☐ 1. Tidak ada
 ☐ 2. Ada tetapi tidak berfungsi
 ☐ 3. Berfungsi kurang maksimal
 ☐ 4. Dikelola dengan baik



Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Sekretaris Camat 2024

Nilai SAKIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 adalah 75,60 atau dengan persentase capaian 100,80% dari target 75. Nilai 75,60 termasuk dalam katagori capaian **“Sangat Baik”**.

Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dimana Kecamatan Bati-bati mendapatkan nilai SAKIP 71,70, dan Tahun 2023 dengan nilai 67,3, maka Tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai 75,60 dari target 75 atau tercapai 100,80%. Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
		2022	2023	2024
a. Perencaanaan Kinerja	30	21,99	20,10	22,50
b. Pengukuran Kinerja	30	20,01	20,70	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15	9,5	9,75	11,25
d. Evaluasi Internal	25	10	16,75	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		71,7	67,3	75,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB

Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPD 2024-2026

Realisasi sasaran starategis sekretaris camat dengan indikatornya telah tercapai atau telah melebihi dari target RPD 2024-2026. Yaitu pada target ditetapkan nilai 75 ternyata tercapai 75,60 atau 100,80%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Kecamatan lain

Dibandingkan dengan Kecamatan Bajuin dan Bumi Makmur maka capaian kinerja Kecamatan Bati-Bati untuk nilai SAKIP berada di tengah-tengah yaitu 75,60 sedangkan Bajuin 77,45 tetapi target 83,00 dan Kecamatan Bumi Makmur dengan nilai 72,10 dari target 75 dan tidak tercapai. Kecamatan Bati-Bati teleh melebihi target kinerja.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 75,60 dengan perdikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**” yaitu akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun masih perlu sedikit perbaikan dan kmitmen dalam manajemen kinerja.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Bati-bati. Hal ini ditunjang kurangnya Sumberdaya Manusia yang ada baik secara kuantitas maupun kompetensinya, juga kurangnya sarana prasarana penunjang yang mendukung pelayanan.

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi capaian kinerja Sekretaris Camat Kecamatan Bati-Bati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Efisiensi Capaian Kinerja Sekretaris Camat Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2024

No	Persentase Kinerja	Persentase Keuangan	Efisiensi
1.	100,89	88,69	12,20

Persentase capaian kinerja Sekretaris Camat Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dengan rata-rata capaian 100,89% dengan pencapaian keuangan 88,693% maka didapatkan efisiensi kinerja sebesar 11,51%.

Analisis prgram/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Bati-Bati di dukung oleh Program/kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan pagu Rp. 4.031.627.904,- dan realisasi sebesar Rp. 3.575.526.690,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.21
Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4,00	5=4/3*100
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH		4.031.627.904	3.575.526.690,00	88,69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.511.241	9.422.337,00	81,85
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.994	4.288.778,00	79,33
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.105.247	5.133.559,00	84,08
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.204.519.778	2.807.494.936,00	87,61
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.519.778	2.807.494.936,00	87,61
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.540.000	13.450.000,00	86,55
4		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.540.000	13.450.000,00	86,55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		320.178.851	305.853.418,00	95,53
5		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.166.772	2.835.600,00	89,54
6		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.979.412	17.152.900,00	81,76
7		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.152.322	7.582.200,00	93,01
8		Penyediaan bahan/material	30.680.345	29.935.000,00	97,57
9		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	257.200.000	248.347.718,00	96,56
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		117.556.504	99.250.000,00	84,43
10		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.556.504	99.250.000,00	84,43
	Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah		254.731.530	232.584.699,00	91,31
11		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.245.000	74.510.018,00	78,23
12		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.220.042	3.821.500,00	90,56
13		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.266.488	154.253.181,00	99,35
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		107.590.000	107.471.300,00	99,89
14		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	37.000.000	36.999.300,00	100,00
15		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	51.000.000	50.992.000,00	99,98
16		Pemeliharaan Mebel	6.440.000	6.440.000,00	100,00
17		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.150.000	13.040.000,00	99,16

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi**
- a. Kurangnya tenaga ASN yang kompeten menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis.
 - b. Kurangnya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf untuk penyusunan Perencanaan, evaluasi dan monitoring, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD.

Adapun solusi untuk memecahkan kendala

- a. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang kompeten menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Bati-bati sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran.
- b. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Bati-Bati dalam rangka penyusunan Perencanaan, evaluasi dan monitoring dan penyusunan renstra
- c. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMĐ) untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan.
- d. Advokasi kepada stakeholder pemangku kepentingan dalam hal meningkatkan kinerja kesekretariatan di kecamatan

3. Eselon IVa (Kepala Seksi Pelayanan)

Target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja kepala seksi pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 22
Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Seksi Pelayanan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK Pelayanan	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen	100	100
		Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Dokumen	4	100
		Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	12	100
Rata-Rata Capaian						100

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Indikator kinerja kepala seksi pelayanan adalah persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Rumus Perhitungan :

1. Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu

Persentase objek pelayanan
yang diselesaikan tepat waktu

=

Jumlah Objek pelayanan yg
diselesaikan tepat waktu

Jumlah objek pelayanan yang
yang ada

X 100

Adapun objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu berta jumlahnya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga) : 434 dokumen
2. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual : 520 dokumen
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah : 128 dokumen
4. Pelayanan pembuatan Akte lahir : 130 dokumen
5. Pelayanan pembuatan Akte kematian : 49 dokumen
6. Pelayanan pembuatan KIA : 48 dokumen
7. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah : 84
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ket. Tidak Mampu (SKTM) : 446 dok.
9. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK : 47 dokumen
10. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris : 77 dokumen
11. Pelayanan Surat pernyataan Waris : 9 dokumen
12. Pelayanan Surat kuasa Waris : 6 dokumen
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian : 1 dokumen
14. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili : 1 dokumen
15. Pelayanan Surat Keterangan Kematian : 2 dokumen
16. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ket. Usaha (SKTU) : 83 dokumen
17. Pelayanan pembuatan surat keterangan Belum nikah : 12 dokumen
18. Pelayanan pembuatan surat keterangan Tanggungan : 62 dokumen

Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis kasi pelayanan Tahun 2024 tercapai 100%. Dilihat dari capaian tahun sebelumnya sama tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Seksi pelayanan dalam mencapai sasaran strategisnya didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 4.986.066,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.646.560,- atau 93,19% dari pagu. Capaian realisasi anggaran mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu 94,94% atau turun 1,75%, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Kepala Seksi Pelayanan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp 4.986.066,00	Rp 4.646.560,00	93,19
	Total	4.986.066	4.646.560	93,19

Seksi pelayan telah mencapai Target kinerja dengan capaian 100% dan capaian realisasi anggaran 93,19% dengan efisiensi kinerja 6,81%. Secara rinci terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Efisiensi Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

No	Persentase Kinerja	Persentase Keuangan	Efisiensi
1.	100	93,19	6,81

Adapun capaian realisasi anggaran terdapat sisa anggaran disebabkan adanya perbedaan satu harga pada pagu di DPA Kecamatan Bati-bati Tahun 2024 dengan harga pembelian. Berikut ini adalah sebagian dokumentasi pada kegiatan seksi tata pemerintahan Tahun 2024 dapat dilihat pada foto-foto berikut ini :

Gambar 3.1
Pemberian pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



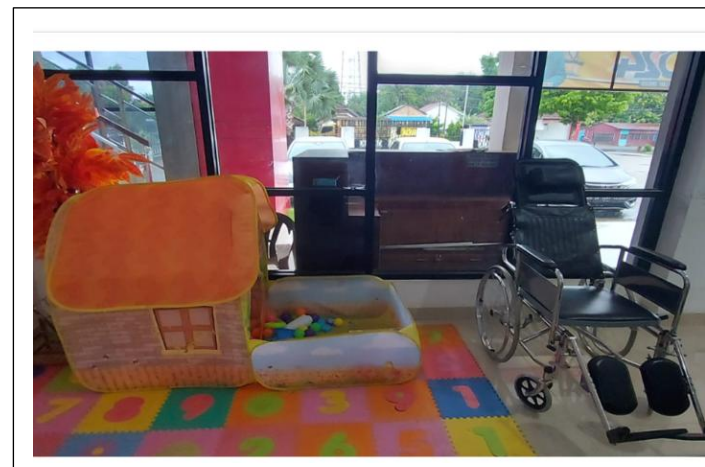
Gambar 3.2
Pemberian pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.3
Pemberian pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.4
Fasilitas Ramah anak dan lansia Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



4. Eselon IVa (Kepala Seksi Tata Pemerintahan)

Target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja kepala seksi tata pemerintahan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.25
Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK Tapem	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terwujudnya desa yang tertib administrasi	Persentase desa yang tertib administrasi	100	Persen	100	100
		Terlaksananya pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian bhineka tunggal ika, serta pemertahanan dan	29	orang	29	100
		Terlaksananya Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	29	orang	29	100
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	12	100
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	Dokumen	14	100
		Rata-Rata Capaian				100

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Rumus Perhitungan :

1. Persentase desa yang tertib administrasi

Persentase desa yang tertib administrasi = $\frac{\text{Jumlah desa yang tertib administrasi}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100$

Desa Tertib Administrasi adalah suatu kondisi di mana desa memiliki sistem administrasi yang rapi, terorganisir, dan efektif dalam mengelola urusan pemerintahan, keuangan, dan kemasyarakatan.

Karakteristik Desa Tertib Administrasi :

- Sistem Administrasi yang Rapi : Desa memiliki sistem administrasi yang terstruktur dan terorganisir.
- Pengelolaan Keuangan yang Baik : Desa memiliki pengelolaan keuangan

yang transparan, akuntabel, dan efektif.

- Dokumentasi yang Lengkap : Desa memiliki dokumentasi yang lengkap dan rapi tentang urusan pemerintahan, keuangan, dan kemasyarakatan.
- Keterbukaan dan Akuntabilitas : Desa memiliki keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan.

Manfaat Desa Tertib Administrasi

1. Meningkatkan Efisiensi : Desa dapat mengelola urusan pemerintahan dan keuangan dengan lebih efisien.
2. Meningkatkan Transparansi : Desa dapat meningkatkan transparansi dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan.
3. Meningkatkan Akuntabilitas : Desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan : Desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari total 14 desa yang ada semua desa telah melakukan tertib administrasi, terorganisir, dan efektif dalam mengelola urusan pemerintahan, keuangan, dan kemasyarakatan.

Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Capaian kinerja seksi tata pemerintahan 100%, artinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja seksi tata pemerintahan tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Tahun 2024 kinerja seksi tata pemerintahan didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sama seperti tahun sebelumnya.

Upaya Upaya yang telah dilakukan;

Pencapaian Sasaran strategis Seksi Tata Pemerintahan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati melalui Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD serta monitoringnya, Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan penjangkaran aparat desa dan BPD.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan anggaran dalam **program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia dan **program pembinaan dan pengawasan pemerintahah desa** dengan kegiatan faslitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pada tahun ini seksi tapem memfasilitasi kegiatan pemilu dan pilkada serentak, pemilihan kepala desa, penjaringan aparat desa dan BPD.

Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja bersangkutan adalah pada seksi tata pemerintahan adalah :

- Banyaknya Penonton yang berantusias mengikuti Pelaksanaan Kegiatan sehingga memadati lapangan dan mengurangi ruang gerak untuk pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kurangnya Durasi Latihan Peserta Paskibra sehingga menyebabkan kesulitan Pelatih untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan Gerakan Anggota Paskibra
- Kurangnya disiplin waktu untuk para anggota Paskibra memperhatikan kesehatan Masing - Masing seperti jam tidur, pola makanan sehingga menyebabkan ada anggota Paskibra yang mengalami hampir Pingsan saat Gladi dilapangan
- Kurangnya perhatian dari Kasi Tata Pemerintahan Desa untuk Update Laporan Data Kependudukan setiap bulan sehingga menyebabkan Laporan Validasi Jumlah Realisasi Data Kependudukan mengalami keterlambatan
- Kesulitan mendapatkan data kependudukan yang valid dan tepat waktu disebabkan kurangnya pemahaman Kepala Dusun dan RT bahwa Laporan Kependudukan harus segera di Laporkan setiap bulan ke Kasi Pemerintahan Desa untuk di Rekap dan diteruskan Ke Kecamatan hanya karena mengalami keterlambatan dalam menerima honor karena pada awal tahun Anggaran APBDes belum turun/disahkan
- Kurangnya Pemahaman Warga yang bekerja dan ditinggal di desa tersebut akan tetapi KTP masih berdomisi di Tempat yang lama sehingga menyulitkan petugas Pendataan dalam menjalankan Tugas

Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Tindak Lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi ditahun ini sekaligus menjawab peningkatan efektifitas dan efisensi kinerja di tahun sebelumnya, seksi tata pemerintahan menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Dalam hal banyaknya Penonton yang berantusias mengikuti Pelaksanaan Kegiatan sehingga memadati lapangan dan mengurangi ruang gerak untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tindak lanjut yang akan dilaksanakan Lebih diperhatikan lagi untuk Anggota Polisi, TNI, Satpol PP dan Kasi Trantib agar bekerja sama dalam menertibkan Masyarakat untuk Keamanan dan ketertiban dilapangan
- Dalam hal kurangnya Durasi Latihan Peserta Paskibra sehingga menyebabkan kesulitan Pelatih untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan Gerakan Anggota Paskibra tindak lanjut yang akan datang Lebih di perhatikan dilapangan untuk perpanjangan waktu latihan sehingga Para Anggota Paskibra lebih terjalin kekompakan dalam gerakan
- Dalam hal Kurangnya disiplin waktu untuk para anggota Paskibra memperhatikan kesehatan Masing - Masing seperti jam tidur, pola makanan sehingga menyebabkan ada anggota Paskibra yang mengalami hampir Pingsan saat Gladi dilapangan tindak lanjut yang akan datang Untuk yang akan datang bagi penyelenggara ataupun Pelatih/ Instruktur agar lebih diperhatikan lagi agar Para Anggota Paskibra lebih memperhatikan Jam Tidur, istirahat dan pola makan agar tidak mengganggu kesehatan pada saat Pelaksanaan Kegiatan dilapangan
- Dalam hal Kurangnya perhatian dari Kasi Tata Pemerintahan Desa untuk Update Laporan Data Kependudukan setiap bulan sehingga menyebabkan Laporan Validasi Jumlah Realisasi Data Kependudukan mengalami keterlambatan tindak lanjut yang akan datang Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan agar lebih giat lagi dalam mengingatkan Kasi Tata Pemerintahan Desa agar Laporan sesuai dengan Target dan Sasaran.
- Dalam hal Kesulitan mendapatkan data kependudukan yang valid dan tepat waktu disebabkan kurangnya pemahaman Kepala Dusun dan RT bahwa Laporan Kependudukan harus segera di Laporkan setiap bulan ke Kasi Pemerintahan Desa untuk di Rekap dan diteruskan Ke Kecamatan hanya karena mengalami keterlambatan dalam menerima honor karena pada awal tahun Anggaran APBDes belum turun/disahkan tindak lanjut yang akan datang Perlunya keterbukaan dan penjelasan ke RT dan Dusun Desa

- setempat untuk tetap melaporkan Data Kependudukan setiap bulan bahwa honor tetap dibayarkan oleh Desa akan tetapi tidak diawal bulan dan menunggu proses APBDes selesai pada Triwulan I
- Dalam hal Kurangnya Pemahaman Warga yang bekerja dan ditinggal di desa tersebut akan tetapi KTP masih berdomisi di Tempat yang lama sehingga menyulitkan petugas Pendataan dalam menjalankan Tugas tindak lanjut yang akan datang Perlunya sosialisasi ke Masyarakat Desa agar Masyarakat lebih memahami betapa pentingnya KTP berdomisili di tempat tinggal dimana dia bekerja dan tinggal sehari - hari untuk mengantisipasi jika terjadi hal - hal yang tidak diinginkan bisa memudahkan aparat Desa bisa memfasilitasi untuk kepengurusannya

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pada tahun 2024 Kasi Tata Pemerintahan dari 2 (dua) Sub Kegiatan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 109.410.158,- dengan realisasi capaian serapan keuangan Rp. 105.890.280,- atau 96.78% dari pagu tersedia. pada tahun 2024 seksi tata pemerintahan telah melaksanakan dan dijalankan sesuai tugas dan fungsinya dengan realisasi capaian indikator kinerja fisik 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Anggaran Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.960.158	96.440.280	96,48
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.450.000	9.450.000	100,00
	Total	109.410.158	105.890.280	98,24

Seksi pemerintahan telah mencapai Target kinerja dengan capaian 100% dan capaian realisasi anggaran 98,24% dengan efisiensi kinerja 1,761%. Secara rinci terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.27
Efisiensi Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2024

No	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Keuangan	Efisiensi
1.	100	98,24	1,76

Berikut ini adalah sebagian dokumentasi pada kegiatan seksi tata pemerintahan Tahun 2024 dapat dilihat pada foto-foto berikut ini :

Gambar 3.5
Latihan Paskibra dalam rangka HUT RI Ke -79 Di Lapangan Temenggung Sutun
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.6
Latihan Paskibra dalam rangka HUT RI Ke -79 Di Lapangan Temenggung Sutun
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.7
Pengukuhan Paskibra dalam rangka HUT RI Ke -79
Di Aula Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.8
Pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke -79
Di Lapangan Temenggung Sutun Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.9
Pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke -79
Di Lapangan Temenggung Sutun Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.10
Pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke -79
Di Lapangan Temenggung Sutun Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.11
Aksi Marcingband dalam rangka memeriahkan Pengibaran Bendera
pada HUT RI Ke -79 Kec. Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.12
Pertemuan update data kependudukan
Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



5. Eselon IVa (Kepala Seksi Kemasyarakatan)

Target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja kepala seksi Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 28
Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Seksi Kemasyarakatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target RPJMD/PK Kemasy	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100	Persen	100	100
		Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan sosial	1000	orang	1000	100
Rata-Rata Capaian						100

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Rumus Perhitungan :

1. Persentase PPKS yang terfasilitasi

Persentase PPKS yang terfasilitasi

=

Jumlah PPKS yang difasilitasi

Jumlah PPKS yang ada

X 100

Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu atau keluarga yang memerlukan bantuan dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti:

Kategori PPKS

- Fakir Miskin: Individu atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Lansia: Individu yang berusia 60 tahun ke atas dan memerlukan bantuan dan dukungan.
- Anak Yatim/Piatu: Anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya.
- Penyandang Disabilitas: Individu yang memiliki kecacatan fisik atau mental.
- Korban Bencana: Individu atau keluarga yang terkena dampak bencana alam atau manusia.
- Pengungsi: Individu atau keluarga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik atau bencana.

Kebutuhan PPKS

- Bantuan Ekonomi: Bantuan uang tunai atau barang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- Pelayanan Kesehatan: Pelayanan kesehatan gratis atau subsidi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
- Pendidikan: Bantuan pendidikan untuk anak-anak atau remaja yang memerlukan.
- Pelayanan Sosial: Pelayanan sosial seperti konseling, mediasi, dan advokasi untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Tujuan PPKS

- Meningkatkan Kesejahteraan: Meningkatkan kesejahteraan individu atau keluarga yang memerlukan.
- Mengurangi Kemiskinan: Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- Meningkatkan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan sosial.

Jumlah dan jenis PPKS yang difasilitasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 29
Jumlah dan jenis PPKS yang difasilitasi Tahun 2024

PPKS	TOTAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
PKH (PT.POS)	165		165		165		165		165		165		165
PKH (BRI)	233			233			233			233			233
BULOG	470		470	470	470	470	470		470		470	470	470
LANSIA	85						85						
DISABILITAS	47						47						
Jumlah	1000		635	703	635	470	1000		635	233	635	470	868

PPKS yang difasilitasi sebanyak 1000 orang selama tahun 2024, tetapi terdapat PPKS yang mendapatkan bantuan berulang per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali, tetapi ada juga PPKS yang mendapatkan bantuan hanya 1 kali per tahun. Dengan demikian target kinerja kepala seksi kemasyarakatan sebanyak 1000 PPKS yang difasilitasi telah tercapai.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pada tahun 2024 Kasi Kemasyarakatan mendapatkan anggaran dengan sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional sebesar Rp. 730.764.784,- dengan realisasi capaian serapan

keuangan sebesar Rp. 727.775.000,- atau 99,59% dari pagu tersedia, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Anggaran Seksi Kemasyarakatan
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 730.764.784,00	Rp727.775.000,00	Rp 99,59
	Total	Rp 730.764.784,00	727.775.000	99,59

Seksi kemasyarakatan telah mencapai Target kinerja dengan capaian 100% dan capaian realiasai anggaran 99,59% dengan efisiensi kinerja 0,41%. Secara rinci terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.31
Efisiensi Capaian Kinerja Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2024

No	Persentase Kinerja	Persentase Keuangan	Efisiensi
1.	100	99,59	0,41

Berikut ini adalah sebagian dokumentasi pada kegiatan seksi tata pemerintahan Tahun 2024 dapat dilihat pada foto-foto berikut ini :

Gambar 3.13
Safari Ramadhan di Masjid Daruh Muhsinin Desa Pandahan Tahun 2024



Gambar 3.15
Pelatihan TC bagi Kafilah Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.14
MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut
Di Kecamatan Jorong Tahun 2024



Gambar 3.16
Pelaksanaan Dana Hibah berupa Tabliq Akbar
di Desa Liang Anggang Tahun 2024



Gambar 3.17
Pelaksanaan Dana Hibah berupa Tabliq Akbar
di Desa Liang Anggang Tahun 2024



Gambar 3.18
Pelaksanaan Dana Hibah berupa Haul Kai Galung (Lamri)
di Desa Ujung Baru Tahun 2024



Gambar 3.19
Pelaksanaan Dana Hibah berupa Turnamen Bola Volly
di Desa Kait-Kait Baru Tahun 2024



Gambar 3.20
Pelaksanaan Dana Hibah berupa Haul Abd Wahab
di Desa Ujung Tahun 2024



6. Eselon IVa (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja kepala seksi Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 32
Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Efisiensi
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK PMD	Sataun	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Persentase BUMDes yang dibina	100	Persen	100	100
		Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	8	100
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah denganPembangunan Desa	1	Dokumen	1	100
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Dokumen	14	100
		Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	14	Lembaga	14	100
		Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14	Laporan	14	100
Rata-Rata Capaian						100

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Rumus Perhitungan :

1. Persentase Bumdes yang dibina

Persentase Bumdes yang
dibina

=

Jumlah Bumdes yang dibina

Jumlah Bumdes yang ada

X 100

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- Dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa.
- Berorientasi pada pelayanan dan pengembangan ekonomi lokal.
- Mengelola usaha-usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.
- Mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

Contoh usaha yang dapat dilakukan BUMDes antara lain:

- Pertanian dan perkebunan.
- Peternakan.
- Perikanan.
- Industri kerajinan.
- Jasa transportasi.
- Jasa keuangan (misalnya, bank desa).
- Pariwisata.

Kecamatan Bati-bati dengan 14 desa memiliki badan usaha milik desa sebanyak 11 Bumdes, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 33
Bumdes yang dibina Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	NAMA DESA	NAMA BUMDES	TANGGAL PEMBENTUKAN	UNIT USAHA BUMDES	KET
1	BANUA RAYA	-	-	-	-
2	BATI - BATI	-	-	-	-
3	PADANG	Padang Berkah Makmur	09 Mei 2022	Penyedia Air Bersih, Penyewaan Tenda Kursi & Meja	Berjalan/Aktif
4	UJUNG	-	-	-	-
5	UJUNG BARU	Gawi Sabumi	16 Desember 2016	Jasa Sewa Tenda	Berjalan/Aktif
6	NUSA INDAH	Anugrah Jaya	14 Maret 2016	Simpan Pinjam, Pengadaan Barang dan Jasa, Waserda, Saprotan dll	Berjalan/Aktif
7	PANDAHAN	Maluka Jaya	21 Desember 2016	Pasar Desa	Berjalan/Aktif
8	LIANG ANGGANG	Berkah Karya Abadi	21 Desember 2021	Jasa Angkutan Sampah dan Katering	Berjalan/Aktif
9	BENTOK KAMPUNG	Mandiri Sejahtera	11 Oktober 2021	Kios Tani	Berjalan/Aktif
10	SAMBANGAN	Gawi Manuntung	15 Juli 2018	Jasa Sewa Tendan & Katering	Berjalan/Aktif
11	BANYU IRANG	Maju Bersama	12 Maret 2018	Trading Material, Hasil Pertanian dan Jasa Angkutan Sampah	Berjalan/Aktif
12	KAIT - KAIT	Maju Bersama	22 September 2020	Pembibitan Kelapa Sawit	Berjalan/Aktif
13	KAIT - KAIT BARU	Bina Sejahtera Maniri	11 September 2020	Jasa Pembayaran Wifi, Penggemukan Sapi	Berjalan/Aktif
14	BENTOK DARAT	Darat	03 Mei 2023	Penggemukan Sapi	Berjalan/Aktif

Pada tahun 2024 Kasi PMD mendapatkan anggaran dengan 3 (tiga) sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebesar Rp.

51.192.305,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 39.743.000,- atau 64,30% dari pagu tersedia, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Anggaran Seksi PMD
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des			
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Rp 1.890.000,00	Rp 1.890.000,00	Rp 100,00
	Terlaksananya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 40.745.563,00	Rp 37.853.000,00	Rp 92,90
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 8.556.742,00	Rp -	Rp -
	Total	Rp 51.192.305,00	39.743.000	64,30

Seksi PMD telah mencapai Target kinerja dengan capaian 100% dan capaian realiasai anggaran 64,30% dengan efisiensi kinerja 35,70%. Secara rinci terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.35
Efisiensi Capaian Kinerja Kasi PMD Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2024

No	Persentase Kinerja	Persentase Keuangan	Efisiensi
1.	100	64,30	35,70

Berikut ini adalah sebagian dokumentasi pada kegiatan seksi PMD Tahun 2024 dapat dilihat pada foto-foto berikut ini :

Gambar 3.21
Pra Evaluasi Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.22
Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan Bati Bati
Tahun 2024



Gambar 3.23
Musrembang Regional
(Kecamatan Bati Bati dan Tambang Ulang) Tahun 2024



Gambar 3.24
Musdes Desa Bati-Bati Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



Gambar 3.25
Musdes Desa Laing Anggang Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



Gambar 3.26
Musrembangdes Desa Bentok Kampung
Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



Gambar 3.27
Monitoring Desa Kait-Kait Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



Gambar 3.28
Sosialisasi Pajak Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



7. Eselon IVa (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum)

Target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja kepala seksi Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 36
Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target/PK Trantib	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	100	Persen	100	100
		Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12	Laporan	12	100
		Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1	Laporan	1	100
		Terlaksanan tugas forum koordinasi pimpinana di Kecamatan	6	Dokumen	6	100
Rata-Rata Capaian						100

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Rumus Perhitungan :

1. Persentase Gangguan kantibmas yang tertangani

Persentase Gangguan kantibmas yang tertangani

=

Jumlah Gangguan kantibmas yang ditangani

Jumlah Gangguan kantibmas yang ada

X 100

Jumlah gangguan kantibmas semua tertangani dan dapat diselesaikan dengan baik. Efisiensi kinerja seksi trantib Tahun 2024 adalah sebesar 19,80%. Gangguan kantibas yang ditangani selama Tahun 2024 dan kegiatan-kegiatan seksi trantib selama Tahun 2024 adalah :

- a. Pengamanan Kotak Suara Pemilu Februari Tahun 2024
- b. Monitoring Kegiatan Pemungutan Suara Pemilu Salah Satu TPS desa Bentok Darat
- c. Rapat Koordinasi Forkopimcam Pengamanan Pemilu 2024
- d. Yustisi Gabungan Warung Remang Remang Bersama Forkopimcam dan Satpol PP Kabupaten Maret 2024
- e. Klarifikasi Laporan Warga Terkait Perbuatan Asusila Aparat Desa Pandahan Bulan April 2024

- f. Rapat Forkopimcam Terkait Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Bati Bati Mei 2024
- g. Monitoring Pangkalan Gas Bersubsidi 3 Kg Wilayah Bati Bati Mei 2024
- h. Survei Lapangan Menindaklanjuti Laporan Warga Pemasangan Baliho Mengganggu Jalan Raya
- i. Pembinaan Dan Pelatihan Desa Liang Anggang, Banyu Irang, Bentok Kampung tahun 2024
- j. Mediasi Sengketa Lahan Warga Dengan PT Brigestone Di Desa Bentok Darat Juli 2024
- k. Sosialisasi P4GN Bagi Aparatur Desa Dan BPD Desa Kecamatan Bati Bati Agustus 2024
- l. Survei Lapangan Pasca Kebakaran Rumah Warga Desa Benua Raya Bulan Agustus 2024
- m. Survei Lapangan Penambangan Liar Oleh Perusahaan Asing Di Desa Banyu Irang Bulan September 2024
- n. Mediasi Aduan Masyarakat Terkait Sengketa Tanah Di Desa Nusa Indah Oktober 2024
- o. Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada Serentak Bulan November 2024
- p. Monitoring Forkopimcam Bati Bati Dan PJ. Bupati dan Sekda Terkait Penyimpanan Kotak Suara
- q. Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Balai Desa Nusa Indah
- r. Pengamanan Kotak Suara Pilkada Serentak di Kecamatan Bati Bati Nopember 2024
- s. Rapat Koordinasi Forkopimcam Dan Mitgasi Bencana Terkait Perubahan Musim Desember 2024

Pada tahun 2024 Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib) mendapatkan anggaran dengan sub kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebesar Rp. 68.657.502,- dengan realisasi capaian sebesar Rp. 54.807.000.,- atau 80,21% dari pagu tersedia, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Anggaran Seksi Trantib
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 23.008.832,00	Rp 18.720.000,00	Rp 81,36
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 45.648.670,00	Rp 36.087.000,00	Rp 79,05
	Total	Rp 68.657.502,00	54.807.000	80,21

Seksi Trantib telah mencapai Target kinerja dengan capaian 100% dan capaian realiasai anggaran 80,21% dengan efisiensi kinerja 19,80%. Secara rinci terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.38
Efisiensi Capaian Kinerja Kasi Trantib Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2024

No	Persentase Kinerja	Persentase Keuangan	Efisiensi
1.	100	80,20	19,80

Berikut ini adalah sebagian dokumentasi pada kegiatan seksi Trantib Tahun 2024 dapat dilihat pada foto-foto berikut ini :

Gambar 3.29
Rapat Koordinasi Forkopimcam Pengamanan Pemilu 2024



Gambar 3.30
Monitoring Kegiatan Pemungutan Suara Pemilu di Salah Satu TPS Desa Bentok Darat



Gambar 3.31
Mediasi Sengketa Lahan Warga Dengan PT Brigestone Di Desa Bentok Kampung Juli 2024



Gambar 3.32
Rapat Koordinasi Forkopimcam Dan Mitgasi Bencana Terkait Perubahan Musim Desember 2024



Gambar 3.33
Yustisi Gabungan P4GN Warung Remang-Remang
Bersama Forkopimcam dan Satpol PP Tahun 2024



Gambar 3.34
Monitoring Bersama Dengan Forkopimcam Kecamatan Bati Bati
Dalam Rangka Pengamanan Kotak Suara Pilkada tahun 2024



Gambar 3.35
Pelatihan Satlinmas Desa Liang Anggang
Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



Gambar 3.36
Monitoring Distribusi Tabung Gas Bersubsidi 3 Kg di Pangkala
Desa Wilayah Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



8. Eselon IVb (Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawaian)

Target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja kepala seksi Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 39
Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK Kasubbag UMPEG	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100	Persen	100	100
2	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Nilai kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90	nilai	90	100
3	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Nilai kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien	90	nilai	90	100
4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Nilai kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90	nilai	90	100
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	8	Laporan	8	100
6	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	26	Paket	26	100
Rata-Rata Capaian						100

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Rumus Perhitungan :

1. % ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik

% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik

=

Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik

Jumlah ASN yang ada

X 100

2. Nilai kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah
3. Nilai kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien
4. Nilai kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
5. Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6. Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Pelayanan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, kenaikan berkala, mutase promosi, pensiun, fasilitasi penilaian ASN 9bulanan dan tahunan). Pelayanan administrasi umum seperti mengagendakan surat masuk dan surat keluar, surat tugas dan SPPD, surat Keputusan. Pengadaan barang berupa drone, LCD, karpets, horden, penambaha daya Listrik, laptop, printer, pengadaan ATK, bahan dan alat kebersihan. Penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yaitu pembayaran Listrik dan internet, pelayanan umum kanot (kebersihan, jaga malam dan adminstrasi kantor lainnya). Pemeliharaan barang milik daerah berupa pemeliharaan kendaraan roda 4 dan 2, pemeliharaan peralatan kantor seperti laptop, computer, printer, AC, dll. Penyediaan pakaian dinas berupa pakaian dinas harian warna coklat khaki.

Pada tahun 2024 subbagian umum dan kepegawaian mendapatkan anggaran dengan 14 sub kegiatan sebesar Rp. **815.595.885,-** dengan realisasi capaian sebesar Rp. **752.169.417,-** atau 92,22% dari pagu tersedia, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Anggaran Subbagian Umpeg
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 15.540.000,00	Rp 13.450.000,00	86,55
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.166.772,00	Rp 2.835.600,00	89,54
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 20.978.412,00	Rp 17.152.900,00	81,76
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.152.322,00	Rp 7.582.200,00	93,01
	Tersedianya Bahan/Material			
5	Penyediaan Bahan/Material	Rp 30.680.345,00	Rp 29.935.000,00	97,57
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 257.200.000,00	Rp 248.347.718,00	96,56
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 117.556.504,00	Rp 99.250.000,00	84,43
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 95.245.000,00	Rp 74.510.018,00	78,23
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 155.266.488,00	Rp 154.253.181,00	99,35
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4.220.042,00	Rp 3.821.500,00	90,56
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 37.000.000,00	Rp 36.999.300,00	100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 51.000.000,00	Rp 50.992.000,00	99,98
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 13.150.000,00	Rp 13.040.000,00	99,16
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel			
14	Pemeliharaan Mebel	Rp 6.440.000,00	Rp 6.440.000,00	100,00
	Total	Rp 815.595.885,00	Rp 752.169.417,00	92,22

Sub bagian umum dan kepegawaian (Umpeg) telah mencapai Target kinerja dengan capaian 100% dan capaian realisasi anggaran 92,22% dengan efisiensi kinerja 7,78%. Secara rinci terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.41
Efisiensi Capaian Kinerja Kasubbag Umpeg Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2024

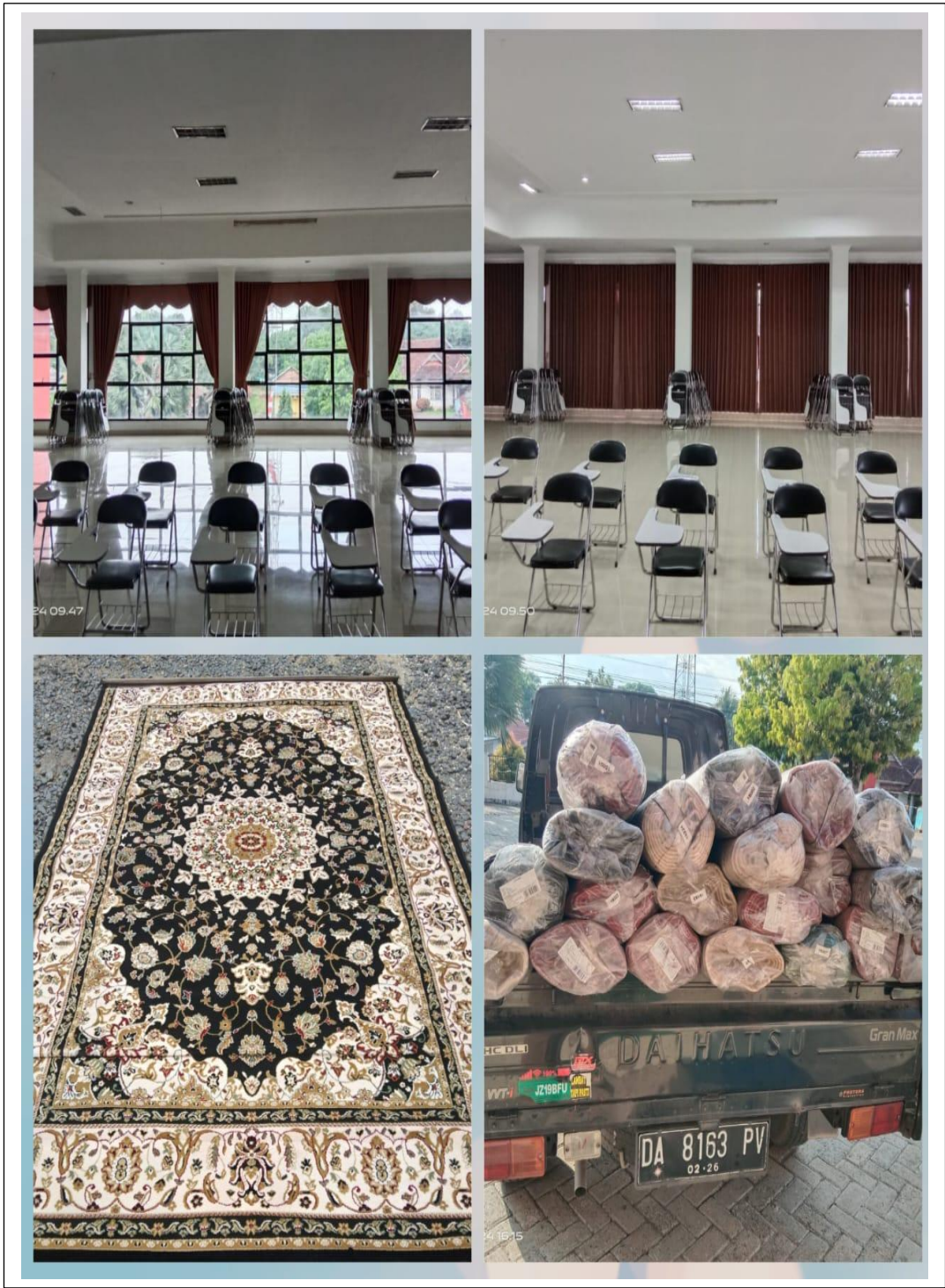
No	Persentase Kinerja	Persentase Keuangan	Efisiensi
1.	100	92,22	7,78

Berikut ini adalah sebagian dokumentasi pada kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian Tahun 2024 dapat dilihat pada foto-foto berikut ini :

Gambar 3.37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD Murni 2024
Berupa Pesawat Drone, LCD Proyektor, Printer dan Laptop



Gambar 3.38
Belanja Modal Alat Rumah Tangga APBD Perubahan 2024
Berupa Horden dan Karpet



Gambar 3.39
Apel Gabungan Dalam Rangka Hari Jadi Tanah Laut Yang Ke 59
Kecamatan Bati- Bati Tahun 2024



Gambar 3.40
Pameran Dalam Rangka Hari Jadi Tanah Laut Yang Ke 59
Kecamatan Bati- Bati Tahun 2024



Gambar 3.41
Kaji Tiru ke Kecamatan Pulau Laut Sigam
Kabupaten Kotabaru



Gambar 3.42
Apel Harian Kecamatan Bati Bati Tahun 2024



9. Eselon IVb (Kepala Sub Seksi Perencanaan dan Keuangan)

Target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja kepala sub bagian perencanaan dan keuangan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 42
Realisasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kepala Subbagian
Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK Kasubbag PRC&KEU	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	Persen	100	100
2	Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda	Nilai kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	90	Nilai	90	100
Rata-Rata Capaian						100

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Rumus Perhitungan :

1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu

Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu

=

Jumlah penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu

Jumlah penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ada

X 100

2. Nilai kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah Berdasarkan hasil penilaian Kesekretariatan

Sasaran strategis subbagian perencanaan dan keuangan telah tercapai 100% dengan efisiensi kinerja sebesar 15,27%. Dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah sejumlah 6 dokumen, berupa Rencana Kerja (renja) 2025, RKA 2025, DPA 2025, Rencana kerja (renja) perubahan 2024, RAK Perubahan 2024 dan DPA Perubahan 2024. Sedangkan kegiatan. Dokumen evaluasi perangkat daerah sebanyak 4 laporan berupa laporan kinerja intansi pemerintah (Lakip), catatan atas laporan

keuangan perangkat daerah (Calk), Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan risk register Tahun 2025.

Pada tahun 2024 sub bagian perencanaan dan keuangan mendapatkan anggaran dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 3.216.031.019,- dengan realisasi capaian serapan keuangan sebesar Rp. 2.816.917.273,- atau 87,59% dari pagu yang tersedia, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.405.994,00	Rp 4.288.778,00	Rp 79,33
	Terlaksananya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.105.247,00	Rp 5.133.559,00	Rp 84,08
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.204.519.778,00	Rp2.807.494.936,00	Rp 87,61
	Total	Rp3.216.031.019,00	2.816.917.273	Rp 87,59

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan (Renkeu) telah mencapai Target kinerja dengan capaian 100% dan capaian realiasai anggaran 87,59% dengan efisiensi kinerja 15,27%. Secara rinci terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.44
Efisiensi Capaian Kinerja Kasubbag Renkeu Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2024

No	Persentase Kinerja	Persentase Keuangan	Efisiensi
1.	100	84,73	15,27

Berikut ini adalah sebagian dokumentasi pada kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian Tahun 2024 dapat dilihat pada foto-foto berikut ini :

Gambar 3.5
Rapat Penyusunan Renja 2025
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024



Gambar 3.5
Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV
Kecamatan BatiiBati Tahun 2024



Gambar 3.5
Penginputan pada Aplikasi E-SAKIP di Galxy Hotel
Banjarmasin Tahun 2024



Gambar 3.5
Sosialisasi Pedoman Penyusunan LKj Tahun 2024



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, pada APBD TA 2024 Kabupaten Tanah Laut telah mengalokasikan dana untuk Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.996.638.717,- dari anggaran yang tersedia tersebut total capaian realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 4.508.388.530,- atau 90.23% dari anggaran yang diberikan. Berdasarkan capaian diatas Kecamatan Bati-Bati mempunyai sisa anggaran (Silpa/surplus) sebesar Rp.488.250.187,- atau 9.77%. secara rinci anggaran Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 terdapat dalam tabel-tabel berikut Ini :

a. Belanja Tidak Langsung

Total Anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 adalah Sebesar Rp. 3.204.519.778,- Realisasi anggaran Rp. 2.807.494.936,-, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.45
Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Bati-bati
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
I	Belanja Pegawai	2.807.494.936,00	2.661.890.522,00	145.604.414,00	5,47
1	Gaji dan Tunjangan ASN	1.536.055.617,00	1.437.902.751,00	98.152.866,00	6,83
A	Gaji Pokok ASN	1.081.197.292,00	1.021.016.926,00	60.180.366,00	5,89
	Tunjangan Keluarga ASN	103.886.522,00	92.089.934,00	11.796.588,00	12,81
	Tunjangan Jabatan ASN	73.750.000,00	79.525.000,00	(5.775.000,00)	(7,26)
	Tunjangan Fungsional ASN	7.910.000,00	5.590.000,00	2.320.000,00	41,50
	Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.390.000,00	23.985.000,00	405.000,00	1,69
	Tunjangan Beras ASN	53.808.260,00	51.345.780,00	2.462.480,00	4,80
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	97.200.426,00	74.403.100,00	22.797.326,00	30,64
	Pembulatan Gaji ASN	14.806,00	13.284,00	1.522,00	11,46
	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	84.928.695,00	81.540.712,00	3.387.983,00	4,15
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.242.394,00	2.098.255,00	144.139,00	6,87
	Iuran Jaminan Kematian ASN	6.727.222,00	6.294.760,00	432.462,00	6,87
B	Tambahan Penghasilan ASN	1.271.439.319,00	1.223.987.771,00	47.451.548,00	3,88
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.059.450.493,00	1.057.097.950,00	2.352.543,00	0,22
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	211.988.826,00	166.889.821,00	45.099.005,00	27,02

Laporan Operasional Kec. Bati-Bati Tahun 2024

Realisasi Belanja Pegawai kantor Kecamatan Bati Bati pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.807.494.936,-,atau 87,61% dari pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 3.204.519.778,- masih terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. 397.024.842,- atau 14,37%. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi capaian anggaran tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.661.890.522,- atau 85,62% dari pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 3.096.852.863,- masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 434.962.341,- atau 14,38%. Dari persentase keuangan mengalami kenaikan dari 85,62% (2023) menjadi 87,61% (2024).

b. Belanja Langsung

Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mewujudkan capaian target indikator kinerja yang inginkan, dalam DPA Kecamatan Bati-Bati mendapatkan anggaran dengan total nilai keseluruhan Belanja langsung adalah sebesar Rp. 1.792.118.939,-, dengan capaian realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.700.893.594,- atau mencapai 94,90%, dengan demikian pada tahun 2024 Kecamatan Bati-Bati terdapat sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 91.225.345,-. Atau 9,06%.

Jika digabungkan Sisa anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung terdapat sebesar Rp. 488.250.187,- atau 9,77% dari total pagu. Sisa anggaran sebagian besar terdapat pada sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Analisa capaian keuangan dan kinerja sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati mengalami kenaikan realisasi keuangan pada tahun 2024 sebesar 6,75%, jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2023. Kecamatan Bati-Bati pada tahun anggaran 2024 ini hanya melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pusat.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik untuk memenuhi pelayanan seluruh kegiatan walaupun realisasi anggaran kegiatan Tahun 2024 ini masih belum maksimal namun secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti.

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Data-data anggaran berdasarkan program dalam sasaran strategis kasi dan kasubbag dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Tabel 3.46
Sasaran Strategis dan Dukungan Anggarannya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS KASI/KASUBBAG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4,00	5=4/3*100
		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	4.031.627.904	3.575.526.690,00	88,69
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.511.241	9.422.337,00	81,85
1	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.994	4.288.778,00	79,33
2	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.105.247	5.133.559,00	84,08
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.204.519.778	2.807.494.936,00	87,61
3	Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.519.778	2.807.494.936,00	87,61
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.540.000	13.450.000,00	86,55
4	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.540.000	13.450.000,00	86,55
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.178.851	305.853.418,00	95,53
5	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.166.772	2.835.600,00	89,54
6	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.979.412	17.152.900,00	81,76
7	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.152.322	7.582.200,00	93,01
8	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Penyediaan bahan/material	30.680.345	29.935.000,00	97,57
9	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	257.200.000	248.347.718,00	96,56
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.556.504	99.250.000,00	84,43
10	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.556.504	99.250.000,00	84,43
		Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah	254.731.530	232.584.699,00	91,31
11	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.245.000	74.510.018,00	78,23
12	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.220.042	3.821.500,00	90,56
13	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.266.488	154.253.181,00	99,35

NO	SASARAN STRATEGIS KASI/KASUBBAG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.590.000	107.471.300,00	99,89
14	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	37.000.000	36.999.300,00	100,00
15	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	51.000.000	50.992.000,00	99,98
16	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Pemeliharaan Mebel	6.440.000	6.440.000,00	100,00
17	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.150.000	13.040.000,00	99,16
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.986.066	4.646.560,00	93,19
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.986.066	4.646.560,00	93,19
18	Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.986.066	4.646.560,00	93,19
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.635.563	39.743.000,00	93,22
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.635.563	39.743.000,00	93,22
19	Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.890.000	1.890.000,00	100,00
20	Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.745.563	37.853.000,00	92,90
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN MASYARAKAT	23.008.832	18.720.000,00	81,36
		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	23.008.832	18.720.000,00	81,36
21	Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.008.832	18.720.000,00	81,36
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	876.373.610	860.302.280,00	98,17
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	876.373.610	860.302.280,00	98,17

NO	SASARAN STRATEGIS KASI/KASUBBAG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%
22	Terwujudnya desa yang tertib administrasi	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.960.156	96.440.280,00	96,48
23	Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	730.764.784	727.775.000,00	99,59
24	Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.648.670	36.087.000,00	79,05
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.006.742	9.450.000,00	52,48
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.006.742	9.450.000,00	52,48
25	Terwujudnya desa yang tertib administrasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.450.000	9.450.000,00	100,00
26	Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.556.742	0,00	-
			4.996.638.717	4.508.388.530,00	90,23

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Pada Tahun 2024 Kecamatan Bati-Bati dalam dokumen perencanaannya Refocusing Kegiatan pada program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, Berikut ini perbandingan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Tabel 3.47
Perbandingan Program Dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024.

NO	2023		2024	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
4			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
8	Penyediaan bahan/material		Penyediaan bahan/material	
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	2023		2024	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah		Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah	
11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
12		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
13		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	
15		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Pemeliharaan Mebel	
17			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
18	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
20			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN MASYARAKAT		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN MASYARAKAT	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	
21	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
22	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
23	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	
24	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
25	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
26	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	6 PROGRAM, 11 KEGIATAN 25 SUB KEGIATAN		6 PROGRAM, 12 KEGIATAN 26 SUB KEGIATAN	
	TOTAL ANGGARAN Rp. 5,176,183,352,-		TOTAL ANGGARAN Rp. 4.996.638.717,-	

Tabel 3.48
Perbandingan Belanja Langsung Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	2023		2024	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	3.096.852.863,00	Belanja Pegawai	3.204.519.778,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.079.330.489,00	Belanja Barang dan Jasa	1.792.118.939,00
	Total	5.176.183.352,00	Total	4.996.638.717,00

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terutama sumber daya berupa anggaran belanja tidak tercapai 100% disebabkan antara lain :

- Tidak terserapnya seluruh anggaran di kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah disebabkan oleh adanya sisa satuan harga, harga belanja lebih rendah dari harga pagu.
- Terdapat sisa anggaran gaji dan tunjangan yang besar disebabkan terdapat kekosongan jabatan Kasi pelayanan selama 1 tahun hanya tunjangan diserap oleh Plt. juga anggaran gaji dan tunjangan murni sudah berlebihan tetapi pada perubahan tetap ditambahkan pagu perubahan
- Terdapat sisa anggaran pembelian seragam disebabkan oleh adanya sisa satuan harga. Harga belanja lebih rendah dari harga pagu.
- Terdapat sisa anggaran penyediaan barang dan perjalanan dinas disebabkan oleh adanya sisa satuan harga. Harga belanja lebih rendah dari harga pagu.
- Terdapat sisa anggaran pembelian peralatan dan mesin disebabkan oleh adanya sisa satuan harga. Harga belanja lebih rendah dari harga pagu.
- Terdapat sisa anggaran pembayaran listrik dan internet disebabkan sisa pembayaran setahun karena dibayarkan sesuai struk,
- Terdapat sisa anggaran pada pelayanan umum kantor disebabkan sisa pembayaran uang kecelakaan dan kematian yang tidak di klaim.
- Terdapat sisa anggaran pembayaran pemeliharaan BMD disebabkan oleh adanya sisa satuan harga. Harga belanja lebih rendah dari harga pagu.
- Terdapat sisa anggaran pembayaran pembelian barang disebabkan oleh adanya sisa satuan harga. Harga belanja lebih rendah dari harga pagu.

- Terdapat kegiatan yang belum terlaksana yaitu makan minum rapat PKK 1 kali belum terlaksana, perjalanan dinas dlm daerah tidak terserap karena mengikuti perjalanan dinas ketua PKK kabupaten.
- Terdapat kegiatan forkopimcam yang belum terlaksana disebabkan perjalanan dinas tidak terserap, rapat 1 kali tidak terlaksana, honorarium nara sumber 2 x tidak dibayarkan
- Kegiatan pengelolaan aset dan keuangan pemerintahan desa tidak terlaksana karena overlapping dengan dinas PMD.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam dan analisis atas pencapaian terhadap 16 (enam belas) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama yaitu 100% dengan katagori **Sangat memuaskan** (lebih dari 90%) terdiri dari 21 indikator, sedangkan tingkat capaian kinerja dengan katagori **Memuaskan, Sangat Baik, Baik, dan Cukup tidak ada**.

Kami seluruh aparatur Kantor kecamatan Bati-Bati menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyampaikan laporan kinerja 2024 ini masih banyak hal yang harus diperkaya, sehingga evaluasi, saran pendapat maupun kritik sekalipun masih sangat diperlukan demi kemajuan di masa depan. Laporan Kinerja 2024 yang disampaikan hanyalah sepotong bagian dari sebuah dinamika dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat luas dan sangat berat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bati-Bati dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bati-Bati selama Tahun 2024

Capaian Anggaran Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sampai dengan Bulan 31 Desember 2024 adalah sebesar 90,23% untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp. 4.996.638.717,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.508.388.530,00 atau sama dengan 90,23% dengan sisa anggaran Rp. 488.250.187,00 atau sama dengan 9,77%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kecamatan Bati-Bati selama RPD 2024-2026 dalam embangun sistem akuntabilitas kinerja antara lain :

1. Berupaya membangun Budaya Kinerja pimpinan dan seluruh ASN dalam penerapan SAKIP di Kecamatan Bati-Bati
2. telah melaksanakan Evaluasi Budaya Kinerja secara mandiri Dengan Nilai Rata-Rata Sangat Baik
3. Kecamatan Bati-Bati telah mengintegrasikan Aplikasi Si-Monev da E-SAKIP;
4. Camat ikut memacu serta mendorong Seluruh fokus dan concern pada pencapaian Visi Dan Misi Pencapaian kinerja Melalui Penerapan Manajemen Kinerja yang baik;
5. Kecamatan Bati-Bati telah menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level eselon IV.

Dari upaya perbaikan dan penerapan SAKIP tersebut Kecamatan Bati-Bati telah berhasil, antara lain :

1. Kecamatan Bati-Bati telah mencapai sasaran kinerja dengan katagori **sangat memuaskan**
2. Kecamatan Bati-Bati telah memiliki 9 desa dengan katagori Indeks Desa membangun (IDM) Katagori **Mandiri**
3. Kecamatan Bati-Bati telah mencapai realisasi anggaran diatas 90% atau tepatnya 90,23%.
4. Kecamatan Bati-Bati telah berhasil meningkatkan pencapaian nilai SAKIP menjadi 75,6.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bati-Bati tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala. Selanjutnya melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggungjawaban kinerja program;
2. Mengikuti pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang

berkinerja tinggi dan akuntabel, dengan memanfaatkan dokumen kinerja dalam proses perencanaan kinerja selanjutnya;

3. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja terkait dalam sasaran strategis program maupun sasaran strategis organisasi dengan membangun dari bawah indikator kinerja yang baik dengan melakukan perjanjian kerja dan pengukuran kinerja secara berjenjang secara menyeluruh sampai pada semua levelan pejabat eselon terendah;
4. Meningkatkan komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas di lingkungan Kantor Kecamatan Bati-Bati serta meningkatkan pembinaan dalam penerapannya melalui pemberian *reward* bagi ASN yang berkinerja tinggi dan memberikan *punishment* bagi ASN yang belum maksimal berkinerja dengan baik;

Dengan penyusunan Laporan Kinerja 2024 ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kantor Kecamatan Bati-Bati untuk berkarya lebih produktif lagi dimasa depan, sehingga visi dan misi RPD 2024-2026 benar-benar terwujud. Oleh karena itu mulai sekarang upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus ditumbuhkembangkan. Tantangan kedepan tidak makin ringan namun sebaliknya semakin kompleks dan rumit.



Bati-Bati, 13 Januari 2025
Camat Bati Bati

ADE GUMILAR, S.STP
NIP.19841125 2003011001

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-bati

- Kabupaten : Tanah Laut
- Nama SKPD : Kecamatan Bati-bati
- Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- Fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan

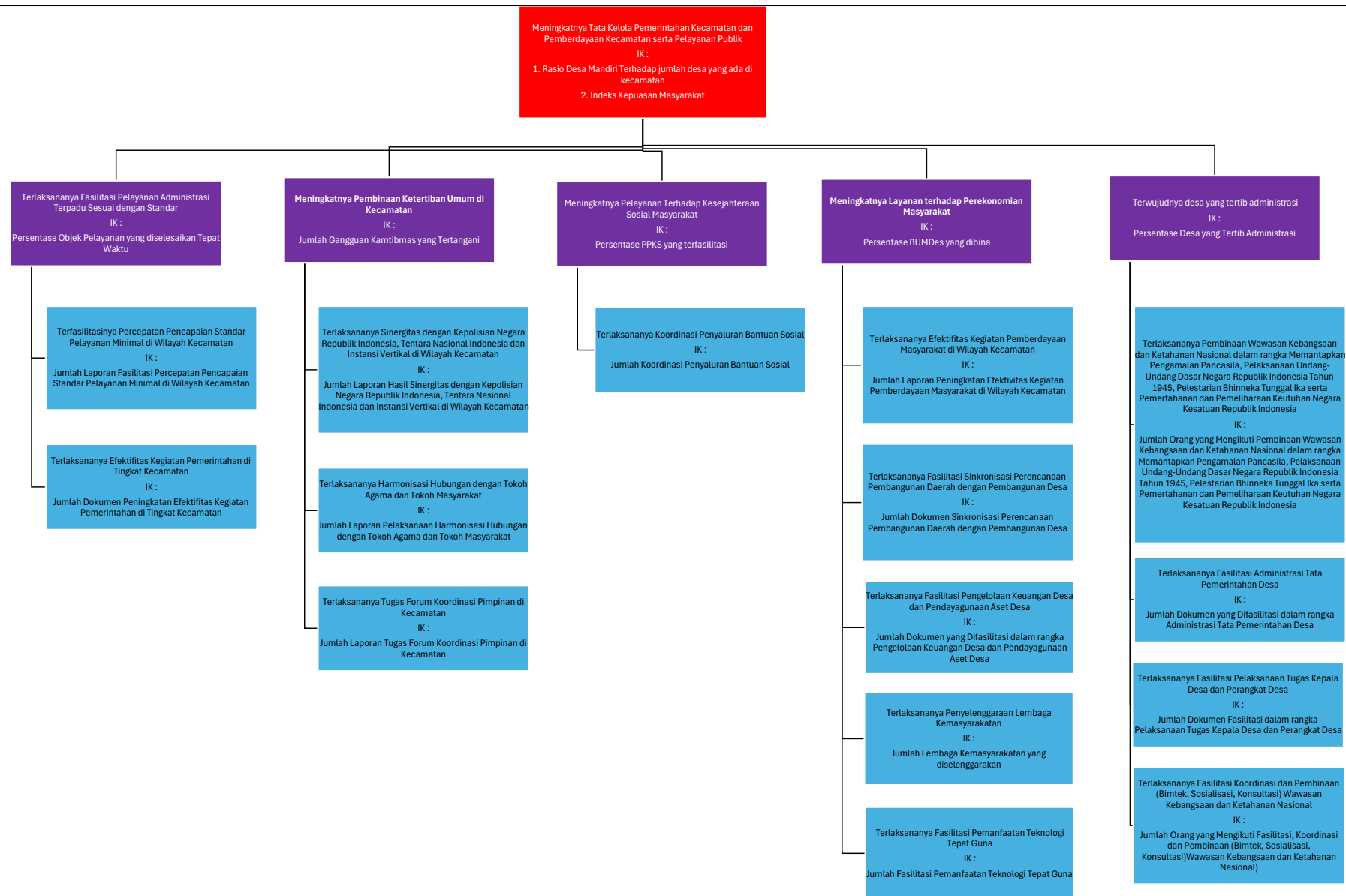
i.Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	0,07	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada	Kecamatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,2	Hasil Survey	Kecamatan
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	75	Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati	Kecamatan



CAMAT BATI-BATI,

ADE GUMILAR, S.STP,M.I.Kom
NIP. 19841125 200312 1 001



Rasio desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan :

IKM : 25.00-64.1

Persentase PPKS yang terfasilitasi :

Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu (Jumlah p

Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangan (Jumlah P

Persentase BUMDes yang dibina (Jumlah b

Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Jumlah d



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI**

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065
Email :kecamatanbatibati@gmail.com

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADE GUMILAR, S.STP

Jabatan : CAMAT BATI-BATI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SYAMSIR RAHMAN

Jabatan : Pj. BUPATI TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



H. SYAMSIR RAHMAN

CAMAT BATI-BATI,



ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik		
	1 Rasio Desa Mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	0.07
	2 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	90.2
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati		
	1 Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati	Nilai	75.0

- Jumlah Program : 6 Program
- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 26 Sub kegiatan
- Jumlah Anggaran **Rp 4.996.638.717**

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11.511.241
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.994
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.105.247
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.204.519.778
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.519.778
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.540.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.540.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.178.851
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.166.772
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.979.412
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.152.322
		Penyediaan Bahan/Material	30.680.345
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.200.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	117.556.504
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.556.504
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	254.731.530
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.245.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.220.042
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.266.488
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	107.590.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	51.000.000
		Pemeliharaan Mebel	6.440.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.150.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	4.986.066
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.986.066
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.635.563
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.890.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.745.563
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	23.008.832
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.008.832
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	876.373.610
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.960.156
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	730.764.784
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.648.670
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.006.742
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.450.000
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.556.742
			4.996.638.717

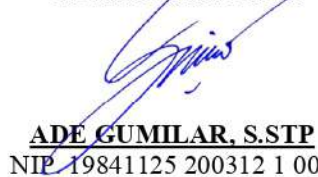
Pj. BUPATI TANAH LAUT,



H. SYAMSIR RAHMAN

Bati Bati, 19 September 2024

CAMAT BATI-BATI



ADE GUMILAR, S.STP

NIP.19841125 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATI-BATI

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065
Email :kecamatanbatibati@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOOR HILMI, S.Sos.
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ADE GUMILAR, S.STP
Jabatan : CAMAT BATI-BATI

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bati-Bati, 19 September 2024

CAMAT BATI-BATI,


ADE GUMILAR, S.STP

NIP. 19841125 200312 1 001

SEKRETARIS CAMAT,


NOOR HILMI, S.Sos.

NIP. 196812232006041004

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN : SEKRETARIS CAMAT (Pejabat Eselon III b)
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan		
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1	Nilai komponen perencanaan	Nilai 22.5
	2	Nilai komponen pengukuran	Nilai 23.10
	3	Nilai Komponen pelaporan	Nilai 11.25
	4	Nilai komponen evaluasi internal	Nilai 18.75
	5	Hasil survei pelayanan kesekretariatan penunjang kinerja Perangkat Daerah	Nilai 90

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 3.808.392.112

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	11.511.241
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.154.519.778
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	230.178.851
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	226.981.530
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	107.590.000
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	62.070.712
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	15.540.000

CAMAT BATI-BATI

ADE GUMILAR, S.STP
 NIP. 19841125 200312 1 001

Bati Bati, 19 September 2024

SEKRETARIS CAMAT

NOOR HILMI, S.Sos.
 NIP. 19681223 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATI-BATI

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065
Email :kecamatanbatibati@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. FAUZI RIFANI, S. Kep, Ns, MM
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ADE GUMILAR, S.STP
Jabatan : CAMAT BATI-BATI

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bati- Bati, 19 September 2024

CAMAT BATI-BATI,



ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

KASI TATA PEMERINTAHAN,



FAUZI RIFANI, S. Kep.Ners, MM
NIP. 19671225 199002 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

JABATAN : KASI TATA PEMERINTAHAN (Pejabat Eselon IV a KASI TATA PEMERINTAHAN (Pejabat Eselon IV a)
SOPD : KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya desa yang tertib administrasi			Rp 109.410.158
	1 Kegiatan : 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	1 Persentase desa yang tertib administrasi	persentase	100	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Rp 99.960.156,00
	1 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	29	
	2 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	29	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Rp 9.450.000,00
	1 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
	1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	
	2 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	14	

Keterangan :

- * Jumlah Program 2 Program
- * Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan
- * Jumlah Anggaran Rp 109.410.158

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UMUM Sesuai Penugasan Kepala Daerah		:	Rp	99.960.158
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan				
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia		:	Rp	99.960.158
1.	tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Mempertahankan dan Pemeliharaan			
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Program Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah		:	Rp	9.450.000
Desa		:	Rp	9.450.000
1.	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	:	Rp	9.450.000

CAMAT BATI-BATI

ADE GUMILAR, S.STP

NIP. 19841125 200312 1 001

Bati Bati, 19 September 2023

KASI TATA PEMERINTAHAN

FAUZI RIFANI, S. Kep, Ns, MM

NIP. 19671225 1999002 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATI-BATI

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065
Email :kecamatanbatibati@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. M. NOOR, S.Sos.,M.P.H.
Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ADE GUMILAR, S.STP
Jabatan : CAMAT BATI-BATI

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bati-Bati, 19 September 2024

CAMAT BATI-BATI,


ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN,


H. M. NOOR, S.Sos. M.P.H.
NIP. 196902051989031004

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

JABATAN : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (Pejabat Eselon IV a)
SOPD : KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan			Rp 60.557.502
	1 Kegiatan : 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	1 Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	%	100	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Rp 14.908.832,00
	1 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
	1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	
	2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	
2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Rp 45.648.670,00
	2 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
	1 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	

* Jumlah Program : 2 Program
* Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
* Jumlah Anggaran **Rp 60.557.502**

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban UMUM	:	Rp	60.557.502
1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	:	Rp	45.648.670
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	:	Rp	14.908.832

CAMAT BATI-BATI

ADE GUMILAR, S.STP

NIP. 19841125 200312 1 001

Bati Bati, 19 September 2024

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

H.M. NOOR, S.Sos. M.P.H.

NIP. 196902051989031004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATI-BATI

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HELINDA NORLAILINAWATI, S. Pi
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ADE GUMILAR, S.STP
Jabatan : CAMAT BATI-BATI

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bati-Bati, 19 September 2024

CAMAT BATI-BATI,


ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA,


HELINDA NORLAILINAWATI, S. Pi
NIP. 19700131 200701 2 012

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

JABATAN : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Pejabat Eselon IV a)
SOPD : KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat			Rp 49.385.563
	1 Kegiatan : 7.01.03.2.01 - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			
	1 Persentase BUMDes yang dibina	persentase	100	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Rp 8.640.000,00
	1 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa			
	1 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	
2	Terlaksananya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Rp 40.745.563,00
	2 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	1 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	
3	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Rp 8.556.742,00
	3 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
	1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	14	
	2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga	14	
	3 Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	14	

Keterangan :

- * Jumlah Program 2 Program
- * Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan
- * Jumlah Anggaran Rp 49.385.563

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa : Rp 40.745.563,00

1 Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : Rp 40.745.563

Program Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa :

Rp 8.640.000

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musawarah Perencanaan Pembangunan di Desa : Rp 8.640.000

Bati Bati, 19 September 2024

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

CAMAT BATI-BATI


ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001


HELINDA NORLAILINAWATI, S.PI
NIP. 19700131 200701 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI**

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065
Email :kecamatanbatibati@gmail.com

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BATI - BATI KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. RUKAIYAH, S. Ag
Jabatan : KASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ADE GUMILAR, S.STP
Jabatan : CAMAT BATI-BATI

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bati- Bati, 19 September 2024

CAMAT BATI-BATI,



ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

KASI KEMASYARAKATAN,



Hj. RUKAIYAH, S. Ag
NIP. 19681228 200604 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

JABATAN : KASI KEMASYARAKATAN (Pejabat Eselon IV a)
SOPD : KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat			Rp 730.764.784,00
	1 Kegiatan : 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	1 Persentase PPKS yang terfasilitasi	persentase	100	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Rp 730.764.784,00
	2 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
	1 Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Orang	1000	

Keterangan :

* Jumlah Program	1 Program
* Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan
* Jumlah Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan
* Jumlah Anggaran	Rp 730.764.784

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UMUM Sesuai Penugasan Kepala Daerah

		:	Rp	730.764.784
1.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	:	Rp	730.764.784

CAMAT BATI-BATI

ADE GUMILAR, S.STP

NIP. 19841125 200312 1 001

Bati Bati, 19 September 2024

KASI KEMASYARAKATAN

Hj. RUKAIYAH, S. Ag

NIP. 19681226 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATI-BATI

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUKHRIZAL DISY, SH
Jabatan : PLT. KASI PELAYANAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ADE GUMILAR, S.STP
Jabatan : CAMAT BATI-BATI

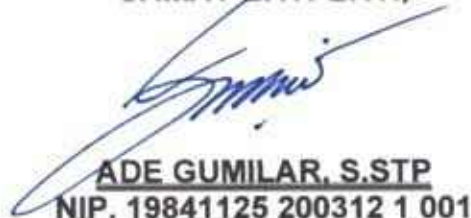
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

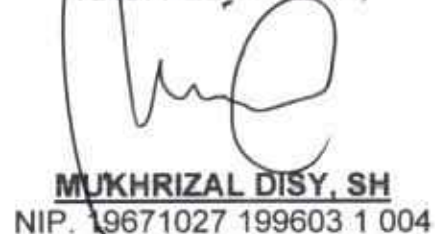
Bati - Bati, 19 September 2024

CAMAT BATI-BATI,



ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

KASI PELAYANAN,



MUKHRIZAL DISY, SH
NIP. 19671027 199603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

JABATAN : KASI PELAYANAN (Pejabat Eselon IV a)
SOPD : KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar			Rp 4.986.066,00
	1 Kegiatan : 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	1 Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Rp 4.986.066,00
	1 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
	1 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	4	
	2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 4.986.066

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1. Fasilitasi percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan

Rp4.986.066,00

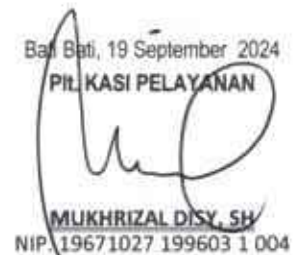
Rp4.986.066,00

CAMAT BATI-BATI


ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

Bati Bati, 19 September 2024

PIL KASI PELAYANAN


MUKHRIZAL D/ SY, SH
NIP. 19671027 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATI-BATI

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065
Email :kecamatanbatibati@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ELYANI, SKM., M.Kes.

Jabatan : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOOR HILMI, S.Sos.

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SEKRETARIS CAMAT,


NOOR HILMI, S.Sos.
NIP. 196812232006041004

Bati - Bati, 19 September 2024

KASUBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,


ELYANI, SKM., M.Kes.
NIP. 197803202005012017

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

JABATAN : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN (Pejabat Eselon IV b)
SOPD : KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen			Rp 11.511.2410,00
	1 <i>Kegiatan : 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase	100	
2	Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda			Rp 3.154.519.778,00
	2 <i>Kegiatan : 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	1 Nilai kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Nilai	90	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Rp 5.405.994,00
	1 <i>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>			
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	
2	Terlaksananya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Rp 6.105.247,00
	2 <i>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	1 Jumlah laporan hasil reviu Rencana Kerja terhadap Rencana Strategis	Dokumen	4	
3	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			Rp 3.154.519.778,00
	3 <i>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			
	1 Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	20	

* Program : 1 Program
* Kegiatan : 2 Kegiatan
* Anggaran : Rp 3.166.031.019

Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prerangkat Daeral	:	Rp 11.511.241
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	:	Rp 3.154.519.778

SEKRETARIS CAMAT

NOOR HILMI, S.Sos.

NIP. 19681223 200604 1 004

Bati Bati, 19 September 2024

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ELYANI, SKM., M.Kes.

NIP. 197803202005012017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATI-BATI

Jalan A. Yani Nomor 05 Desa Padang KodePos 70852Telp. (0512) 26065

Email :kecamatanbatibati@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. RUSDANIAH, ST
Jabatan : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOOR HILMI, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SEKRETARIS CAMAT,


NOOR HILMI, S.Sos.
NIP. 196812232006041004

Bati - Bati, 19 September 2024

KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,


Hj. RUSDANIAH, ST
NIP. 19740217 200701 2 007

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

JABATAN : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN (Pejabat Eselon IV b)
SOPD : KANTOR KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 15.540.000,00
	1	Kegiatan : 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	Persentase	100	
2	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal				Rp 230.178.851,00
	2	Kegiatan : 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	Nilai kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Nilai	90	
3	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan				Rp 62.070.712,00
3	Kegiatan : 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Nilai kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien	Nilai	90		
4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik				Rp 226.981.530,00
	4	Kegiatan : 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	Nilai kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai	90	
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik				Rp 107.590.000,00
	5	Kegiatan : 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	8	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			Rp 15.540.000,00
	1	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
	1	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rp 3.166.772,00
	2	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 20.978.412,00
	3	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	
4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			Rp 8.152.322,00
	5	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	
5	Tersedianya Bahan/Material			Rp 30.680.345,00
	6	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		
	1	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 167.200.000,00
	7	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	
7	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			Rp 62.070.712,00
	8	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 67.495.000,00
	10	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	1	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan"	Laporan	
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp 155.266.488,00
	11	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	1	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Laporan	

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	ANGGARAN
10	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp 4.220.042,00
	12	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Rp 37.000.000,00
	13	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Rp 51.000.000,00
	14	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	
13	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Rp 13.150.000,00
	15	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18	
14	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				Rp 6.440.000,00
	16	Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel			
	1	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	46	

* Jumlah Program : 1 Program

* Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan

* Jumlah Anggaran : 642.361.093,00

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan :

1. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	Rp 642.361.093
2. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	:	Rp 230.178.851
3. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp 226.981.530
4. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp 107.590.000
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	:	Rp 62.070.712
		Rp 15.540.000

SEKRETARIS CAMAT

NOOR HILMI, S.Sos.

NIP. 19681223 200604 1 004

Bati Bati, 19 September 2024

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Hj. RUSDANIAH, ST

NIP. 19740217 200701 2 007

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Bati-Bati

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Semua Bidang																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP") (%)	100,00	11.711.451.178	0,00	-	100	4.031.627.904	881.359.264	-	971.131.365	730.469.576	-	992.566.485	-	3.575.526.690	0,00%	88,69%	100,00	3.575.526.690	-	-	30,53%	Bati-Bati				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	35.995.206	0,00	-	100	11.511.241	-	-	-	4.309.778	-	2.744.000	-	2.368.559	-	9.422.337	0,00%	81,85%	0,00	9.422.337	0,00%	52,25%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun") ()	6,00	17.043.250	0,00	-	6	5.405.994	1	-	3	2.684.778	-	744.000	-	860.000	4	4.288.778	66,67%	79,33%	4,00	4.288.778	66,67%	25,16%	Tidak Ada			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3,00	18.951.956	0,00	-	3	6.105.247	3	-	-	1.625.000	-	2.000.000	-	1.508.559	3	5.133.559	100,00%	84,08%	3,00	5.133.559	100,00%	27,09%	Tidak Ada			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	9.903.406.958	0,00	-	100	3.204.519.778	-	719.711.238	-	796.180.682	-	601.622.090	-	689.980.926	-	2.807.494.936	0,00%	87,61%	0,00	2.807.494.936	0,00%	28,35%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20,00	9.903.406.958	0,00	-	20	3.204.519.778	20	719.711.238	20	796.180.682	19	601.622.090	-	689.980.926	15	2.807.494.936	73,75%	87,61%	14,75	2.807.494.936	73,75%	28,35%	Tidak Ada			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	61.000.000	0,00	-	100	15.540.000	-	-	-	13.450.000	-	-	-	-	13.450.000	0,00%	86,55%	0,00	13.450.000	0,00%	22,05%					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20,00	61.000.000	0,00	-	26	15.540.000	-	-	26	13.450.000	-	-	-	-	26	13.450.000	100,00%	86,55%	26,00	13.450.000	130,00%	22,05%	Tidak Ada			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	574.497.101	0,00	-	100	320.178.851	-	71.732.716	-	50.641.324	-	36.126.600	-	147.352.778	-	305.853.418	0,00%	95,53%	0,00	305.853.418	0,00%	214,89%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	9.784.842	0,00	-	1	3.166.772	-	-	1	2.835.600	-	-	-	-	1	2.835.600	100,00%	89,54%	1,00	2.835.600	25,00%	28,98%	Tidak Ada			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	66.186.545	0,00	-	3	20.979.412	3	-	-	17.152.900	-	-	-	-	3	17.152.900	100,00%	81,76%	3,00	17.152.900	60,00%	25,92%	Tidak Ada			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8,00	28.795.089	0,00	-	4	8.152.322	-	1.550.000	-	2.207.600	-	2.031.600	-	1.793.000	-	7.582.200	0,00%	93,01%	0,00	7.582.200	0,00%	26,33%	Tidak Ada			
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3,00	39.414.375	0,00	-	5	30.680.345	-	-	-	-	-	-	-	29.935.000	-	29.935.000	0,00%	97,57%	0,00	29.935.000	0,00%	75,95%	Tidak Ada			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13,00	430.316.250	0,00	-	12	257.200.000	3	70.182.716	3	28.445.224	1	34.095.000	-	115.624.778	7	248.347.718	58,33%	96,56%	7,00	248.347.718	53,85%	57,71%	Tidak Ada			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	119.690.214	0,00	-	100	117.556.504	-	28.100.000	-	21.350.000	-	-	-	-	49.800.000	-	99.250.000	0,00%	84,43%	0,00	99.250.000	0,00%	82,92%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5,00	119.690.214	0,00	-	26	117.556.504	4	28.100.000	2	21.350.000	-	-	-	-	49.800.000	6	99.250.000	23,08%	84,43%	6,00	99.250.000	120,00%	82,92%	Tidak Ada		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		671.294.962	0,00	-	100	254.731.530	-	48.924.310	-	55.985.081	-	53.810.086	-	73.865.222	-	232.584.699	0,00%	91,31%	0,00	232.584.699	0,00%	98,69%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	212.774.835	0,00	-	12	95.245.000	3	12.924.310	3	12.506.432	1	13.772.070	-	35.307.206	7	74.510.018	58,33%	78,23%	7,00	74.510.018	58,33%	35,02%		Tidak Ada			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5,00	13.161.457	0,00	-	1	4.220.042	-	-	1	2.341.500	-	1.480.000	-	-	1	3.821.500	100,00%	90,56%	1,00	3.821.500	20,00%	29,04%		Tidak Ada			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	445.358.670	0,00	-	12	155.266.488	3	36.000.000	3	41.137.149	1	38.558.016	-	38.558.016	7	154.253.181	58,33%	99,35%	7,00	154.253.181	58,33%	34,64%		Tidak Ada			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		345.586.737	0,00	-	100	107.590.000	-	12.891.000	-	29.214.500	-	36.166.800	-	29.199.000	-	107.471.300	0,00%	99,89%	0,00	107.471.300	0,00%	135,30%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)			0,00	-	1		1		1				-	1		75,00%		0,75		0,00%			Tidak Ada				
			*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	115.854.375	0,00	-	1	37.000.000	-	2.900.000	-	12.300.000	-	9.300.000	-	12.499.300	-	36.999.300	0,00%		0,00		0,00%	31,94%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		167.161.313	0,00	-	8	51.000.000	8	6.791.000	8	16.264.500	8	17.136.800	-	10.799.700	6	50.992.000	75,00%	99,98%	6,00	50.992.000	0,00%	30,50%		Tidak Ada			
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	14.000.000	0,00	-	46	6.440.000	-	-	-	-	-	6.440.000	-	-	-	6.440.000	0,00%	100,00%	0,00	6.440.000	0,00%	46,00%		Tidak Ada			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11,00	48.551.049	0,00	-	18	13.150.000	1	3.200.000	5	650.000	-	3.290.000	-	5.900.000	6	13.040.000	33,33%	99,16%	6,00	13.040.000	54,55%	26,86%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								69,37%	88,69%											
										Predikat Kinerja								Sedang	Tinggi											
		KECAMATAN																												
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM (Nilai)	0,00	70.931.250	0,00	-	91	4.986.066									4.646.560								Bati-Bati				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen)	100,00		0,00		100		-		-		-			-			0,00%		0,00		0,00%						
					70.931.250				4.986.066									4.646.560			93,19%		4.646.560		6,55%					
			Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)			0,00		100		-		-		-			-			0,00%		0,00		0,00%						
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		70.931.250			4	4.986.066	1		1		1		1		4		100,00%		4,00		0,00%		Tidak Ada				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
			*Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4,00		0,00		1		-	-	-	-	1		1		100,00%		1,00		25,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00%	93,19%						
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM (Nilai)	0,00	193.941.959	0,00	-	91	42.635.563	1.890.000	6.598.000	8.930.000	22.325.000	39.743.000	0,00%	93,22%	90,50	39.743.000		20,49%	Bati-Bati				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen)		193.941.959	0,00		100	42.635.563	1.890.000	6.598.000	8.930.000	-	22.325.000	-	0,00%	93,22%	0,00	39.743.000		0,00%				
			Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)			0,00		100		-	-	-	-	-	0,00%		0,00		0,00%						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	14,00	22.412.275	0,00	-	14	1.890.000	14	1.890.000	14	-	-	-	7	1.890.000	50,00%	100,00%	7,00	1.890.000	50,00%	8,43%		Tidak Ada
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8,00	171.529.684	0,00	-	8	40.745.563	1	6.598.000	1	8.930.000	-	22.325.000	3	37.853.000	37,50%	92,90%	3,00	37.853.000	37,50%	22,07%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								38,05%	93,22%						
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kecamatan (Nilai)	0,00	41.106.688	0,00	-	91	23.008.832	-	-	11.880.000	6.840.000	18.720.000	0,00%	81,36%	90,50	18.720.000		45,54%	Bati-Bati				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen)	100,00		0,00		100	23.008.832	-	-	11.880.000	6.840.000	18.720.000	0,00%	81,36%	0,00	18.720.000		0,00%					
			Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen)		41.106.688	0,00		100		-	-	-	-	-	0,00%		0,00		0,00%						
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1,00	41.106.688	0,00	-	1	23.008.832	-	-	11.880.000	-	6.840.000	-	18.720.000	0,00%	81,36%	0,00	18.720.000	0,00%	45,54%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	81,36%						
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kecamatan (Nilai)	0,00	4.312.374.041	0,00	-	91	876.373.610	35.580.000	203.012.000	590.160.280	31.550.000	860.302.280	0,00%	98,17%	90,50	860.302.280		19,95%	Bati-Bati				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)		4.312.374.041	0,00		100	876.373.610	35.580.000	203.012.000	590.160.280	31.550.000	860.302.280	0,00%	98,17%	0,00	860.302.280		0,00%					
			Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)			0,00		100		-	-	-	-	-	0,00%		0,00		0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggun gjawab	Keterangan
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			0,00		29		-	-	-	-	-	-	-	0,00%			0,00		0,00%			Tidak Ada		
				331.005.812				99.960.156		-	-	75.240.280		21.200.000		96.440.280		96,48%		96.440.280		29,14%					
			*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	30,00		0,00		29		-	-	-		-		-		0,00%		0,00		0,00%					
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)			0,00		664		-	-	-		-		-		0,00%		0,00		0,00%			Tidak Ada		
				3.686.968.608				730.764.784		29.580.000		191.075.000		507.120.000		-		727.775.000		99,59%		727.775.000		19,74%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1500,00		0,00		664	604	-		-		-		604		90,96%		604,00		40,27%					
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8,00	294.399.621	0,00	-	8	45.648.670	1	6.000.000	2	11.937.000	1	7.800.000	-	10.350.000	4	36.087.000	50,00%	79,05%	4,00	36.087.000	50,00%	12,26%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								40,53%	98,17%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kecamatan (Nilai)	0,00	102.062.188	0,00	-	91	18.006.742		1.350.000		1.350.000		-		6.750.000	-	9.450.000	0,00%	52,48%	90,50	9.450.000		9,26%	Bati-Bati	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100,00		0,00		100		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00		0,00%					
				102.062.188					18.006.742		1.350.000		1.350.000		-		6.750.000		9.450.000		52,48%		9.450.000		12,05%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
			Persentase capaian Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)			0,00		100												0,00%		0,00		0,00%			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		78.418.438	0,00		14												0,00%		0,00		0,00%			Tidak Ada
			*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	14,00		0,00		14	14		14					7			50,00%		7,00		50,00%		12,05%		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1,00	23.643.750	0,00	-	1	8.556.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										13,12%	52,48%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah						
								4.996.638.717		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										63,55%	90,23%						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah	Sangat Tinggi						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):



No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

7056 0,6666667

7057 1

7058 0,7375

7059 1

7060 1

7061 1

7062 0

7063 0

7064 0,5833333

7065 0,2307692

7066 0,5833333

7067 1

7068 0,5833333

7069 0,375

7070 0,75

7071 0

7072 0,3333333

7047 1

7048	0,5
------	-----

7049	0,375
------	-------

7050	0
------	---

7051	0
------	---

7052	0,4548193
------	-----------

7053	0,5
------	-----

7054 0,25

7055 0

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/ d Tahun 2024													
Kabupaten Tanah Laut													
Perangkat daerah : Kecamatan Bati-Bati													
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
X													
X	XX												
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen perencanaan (nilai)	69,3	22,5	22,5	100%	23,1	45,6	66%
						Nilai Komponen pengukuran (nilai)	69,9	23,1	23,1	100%	23,1	46,2	66%
						Nilai Komponen pelaporan (nilai)	34,65	11,25	11,25	100%	11,55	22,8	66%
						Nilai Komponen evaluasi internal (nilai)	39	18,75	18,75	100%	19,25	38	97%
						Hasil survei paleyanan kesekretariatanpenunjang kinerja perangkat daerah	271,5	90	90,88	100%	90,5	181,38	67%
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang tersusun (persentase)	100	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	18	6	6	100%	6	12	67%
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun (dokumen)	12	4	4	100%	4	8	67%
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penunjang layanan publik dan urusan pemerintahan (Persen)	100	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji dan TPP PNS (Bulan)	60	20	20	100%	20	40	67%
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
X	XX	01	205	02	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (paket)	78	26	26	100%	26	52	67%
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang layanan administrasi umum (Persen)	100	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik (paket)	3	1	1	100%	1	2	67%
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	13	5	5	100%	5	10	77%
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	4	2	2	100%	2	4	100%
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan (paket)	20	8	8	100%	8	16	80%
X	XX	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	5	2	2	100%	2	4	80%
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	12	12	100%	12	24	67%
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	17	6	26	433%	14	40	235%
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan umum (Persen)	100	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	12	12	12	100%	16	28	233%
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	12	100%	17	29	242%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disediakan (laporan)	12	12	12	100%	18	30	250%
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	1	1	1	100%	20	21	2100%
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	8	8	8	100%	21	29	363%
X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)	50	50	50	100%	22	72	144%
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit/Tahun)	18	18	18	100%	23	41	228%
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Bati Bati	91	90,02	92,48	103%	100	100	110%
7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	12	4	4	100%	4	8	67%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rasio Desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,21	0,07	0,64	914%	0,14	0,78	371%
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase BUMdes yang dibina	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
7	01	03	201	01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	3	1	1	100%	1	2	67%
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	24	8	7	88%	8	15	63%
7	01	03	203		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (lembaga)	2	0	0	0%	0	0	0%
7	01	03	201	01	Penyenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (lembaga)	2	0	0	0%	0	0	0%
7	01	03	201	05	Fasilitasi Pemanfaatan tepat teknologi tepat guna	Jumlah fasilitasi teknologi tepat guna (laporan)	14	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,21	0,07	0,64	914%	0,14	0,78	371%
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah gangguan kantibmas yang tertangani	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	1	1	100%	1	2	67%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio Desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,21	0,07	0,64	914%	0,14	0,78	371%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peserta Paskibra dalam Peringatan HUT RI di Tingkat Kecamatan (orang)	89	29	29	100%	30	59	66%
7	01	05	201	02	Fasiltasi, koordinasi dan pembinaan(bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasiltasi, koordinasi dan pembinaan(bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	30	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)	3700	1000	1000	100%	1200	2200	59%
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (laporan)	18	6	5	83%	6	11	61%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rasio Desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,21	0,07	0,64	914%	0,14	0,78	371%
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	100	100%	100	100	100%
	01	06	201	01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	36	12	12	100%	12	24	67%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(6+8)	10(9/4)
	01	06	201	02	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa (dokumen)	42	14	14	100%	14	28	67%
	01	06	201	05	Fasilitasi pelaksanan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanan tugas kepala desa dan perangkat desa (dokumen)	14	0	0	0%	0	0	0%
	01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)	4	0	0	0%	2	2	50%

Bati-Bati, 13 Januari 2025
Camat Bat-Bati,



Ade Gumilar, S.STP, M.I.Kom
NIP. 10841125 200312 1 001

**PENGOLAHAN HASIL SURVEI KESEKRETARIATAN
KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2024**

SKPD
ALAMAT
TAHUN

: Kecamatan Bati-Bati
: Jl. A. Yani Desa Padang No. 5 Kecamatan Bati-Bati
: 2024

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	4	3	4
2	3	4	3	4	3	3	4	2	4
3	3	4	3	4	3	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
5	4	3	3	4	3	4	4	3	4
6	3	3	3	4	3	3	4	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	3	4	3	3	4	2	4
10	3	3	4	4	3	3	4	3	4
11	4	4	4	4	4	3	4	4	4
12	3	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	3	3	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	3	3	3	4	3	3	4	4	4
16	4	4	3	4	3	3	4	3	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	4	4	3	3	4	4	4
19	4	4	3	4	4	3	4	3	4
20	3	3	4	4	3	3	4	3	4
ΣNilai /Unsur	69	72	70	80	69	68	80	67	80
NRR / Unsur	3,450	3,600	3,500	4,000	3,450	3,400	4,000	3,350	4,000
NRR tertbg/	0,383	0,400	0,389	0,444	0,383	0,377	0,444	0,372	0,444
IKM Unit pelayanan									*) 3,6
									**) 90,881

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- HSK = hasil Survei Kesekretariatan
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

HSK KECAMATAN : 90,88

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,450
U2	Prosedur pelayanan	3,600
U3	Kecepatan waktu pelayanan	3,500
U4	Kewajaran Biaya/tarif	4,000
U5	Kesesuaian produk dan standar pelayar	3,450
U6	Kemampuan /Kompetensi Petugas	3,400
U7	Perilaku Petugas pelayanan	4,000
U8	Sarana dan Prasarana	3,350
U9	Penanganan Pengaduan	4,000

BATI-BATI, 31 DESEMBER 2024

CAMAT BATI-BATI,



ADE GUMILAR, S.STP,M.I.Kom
NIP. 19841125 200312 1 001